

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 (AUDITED)

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PUSAT PEMBELAJARAN DAN
STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Lembaga Administrasi Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pusjar SKMK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pusjar SKMK. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Aceh Besar, 05 Mei 2026
Kepala,

Said Fadhil, S.IP, MM
NIP. 09781207 200501 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	7
A.1.1. Visi dan Misi	9
A.1.1.1. Visi	9
A.1.1.2. Misi	10
A.1.2. Tujuan dan Sasaran	10
A.1.2.1. Tujuan	10
A.1.2.2. Sasaran	11
A.1.3. Organisasi dan Tata Kerja	11
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	13
A.3. Basis Akuntansi	13
A.4. Dasar Pengukuran	13
A.5. Kebijakan Akuntansi	14
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan	23
B.1.1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	24
B.1.2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	24
B.1.3. Pendapatan Lain-lain	25
B.2. Belanja	26
B.2.1. Belanja Pegawai	27
B.2.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	28
B.2.1.2. Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	29
B.2.1.3. Belanja Gaji Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	29
B.2.2. Belanja Barang	30
B.2.2.1. Belanja Barang Operasional	30
B.2.2.2. Belanja Barang Non Operasional	31
B.2.2.3. Belanja Barang untuk Barang Persediaan	32
B.2.2.4. Belanja Jasa	32
B.2.2.5. Belanja Pemeliharaan	33
B.2.2.6. Belanja Perjalanan Dalam Negeri	33

B.2.3.	Belanja Modal	34
B.2.3.1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34
B.2.3.2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35
C.	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	36
C.1.	Aset Lancar	36
C.1.1.	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	37
C.1.2.	Piutang Bukan Pajak	37
C.1.3.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	38
C.1.4.	Persediaan	39
C.2.	Aset Tetap	39
C.2.1.	Tanah	40
C.2.2.	Peralatan dan Mesin	40
C.2.3.	Gedung dan Bangunan	41
C.2.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	42
C.2.5.	Aset Tetap Lainnya	42
C.2.6.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	43
C.3.	Aset Lainnya	44
C.3.1.	Aset Tak Berwujud	44
C.3.2.	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	45
C.4.	Kewajiban Jangka Pendek	45
C.4.1.	Utang Kepada Pihak Ketiga	46
C.4.2.	Pendapatan Diterima di Muka	46
C.5.	Ekuitas	46
D.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	47
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	47
D.2.	Beban Pegawai	48
D.3.	Beban Persediaan	50
D.4.	Beban Barang dan Jasa	50
D.5.	Beban Pemeliharaan	52
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	52
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	53
D.8.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	54
D.9.	Pos Luar Biasa	54
E.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
E.1.	Ekuitas Awal	55
E.2.	Surplus (Defisit) LO	55
E.3.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	55
E.4.	Transaksi Antar Entitas	56
E.5.	Ekuitas Akhir	56
F.	Pengungkapan Lain-Lain	57
F.1.	Tindak Lanjut Temuan BPK RI	57
F.2.	Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN Pada Catatan Atas Laporan Keuangan	57

F.3.	Penyajian Data Program Prioritas Nasional pada Lampiran Laporan Keuangan	59
F.4.	Pengungkapan Lain-lain	59
F.4.1.	Rekening Pemerintah	59
F.4.2.	Hibah Tanah dari Pemerintah Aceh	60
VI.	Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Surat Hasil Rekonsiliasi
Lampiran II.	Neraca Percobaan Kas
Lampiran III.	Neraca Percobaan Akrua
Lampiran IV.	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran V.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
Lampiran VI.	Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Lampiran VII.	Neraca
Lampiran VIII.	Laporan Operasional
Lampiran IX.	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran X.	Laporan Barang Persediaan
Lampiran XI.	Laporan Posisi BMN di Neraca
Lampiran XII.	Laporan Barang (Intrakomptabel)
Lampiran XIII.	Laporan Barang (Ekstrakomptabel)
Lampiran XIV.	Laporan Penyusutan Barang (Intrakomptabel)
Lampiran XV.	Laporan Penyusutan Barang (Ekstrakomptabel)
Lampiran XVI.	Laporan Kinerja
Lampiran XVII.	Pengembalian Tunjangan Kinerja Desember 2025
Lampiran XVII.	Pengembalian Uang Makan Desember 2025
Lampiran XVIII.	Pengembalian Tunjangan Umum (Cuti Besar) Bulan Juni s.d. Agustus 2025
Lampiran XIX.	Pengembalian Tunjangan Umum (Tugas Belajar) Bulan Juli s.d. Agustus 2025
Lampiran XIX.	Tagihan Belanja Dibayar Dimuka

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel A.1 Perhitungan Penyisihan Piutang	16
Tabel A.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	18
Tabel A.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	19
Tabel B.1 Dipa Awal Pendapatan sebelum dan sesudah revisi	20
Tabel B.2 Pagu Blokir	22
Tabel B.3 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	23
Tabel B.4 Perbandingan Realisasi Pendapatan	23
Tabel B.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	24
Tabel B.6 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Riset dan Teknologi	24
Tabel B.7 Perbandingan Realisasi Pendapatan Lain-lain	25
Tabel B.8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	26
Tabel B.9 Rincian Belanja Berdasarkan Program	27
Tabel B.10 Perbandingan Realisasi Belanja	27
Tabel B.11 Perbandingan Belanja Pegawai	27
Tabel B.12 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	28
Tabel B.13 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	29
Tabel B.14 Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	29
Tabel B.15 Perbandingan Realisasi Belanja Barang	30
Tabel B.16 Perbandingan Realisasi Belanja Operasional	30
Tabel B.17 Perbandingan Realisasi Belanja Non - Operasional	31
Tabel B.18 Perbandingan Realisasi Belanja untuk Persediaan	32
Tabel B.19 Perbandingan Realisasi Belanja Jasa	32
Tabel B.20 Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan	33
Tabel B.21 Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri	33
Tabel B.22 Perbandingan Realisasi Belanja Modal	34
Tabel B.23 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34
Tabel B.24 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35
Tabel C Neraca	35
Tabel C.1 Rincian Belanja Dibayar Dimuka	37
Tabel C.2 Piutang Bukan Pajak	37
Tabel C.3 Rincian Piutang Lainnya	38
Tabel C.4 Rincian Persediaan	39
Tabel C.5 Rincian Aset Tetap	39
Tabel C.6 Rincian Tanah	40
Tabel C.7 Rincian Peralatan dan Mesin	41
Tabel C.8 Rincian Gedung dan Bangunan	41
Tabel C.9 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan	42
Tabel C.10 Rincian Aset Tetap Lainnya	43
Tabel C.11 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	43
Tabel C.12 Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	44
Tabel C.13 Rincian Aset Tak Berwujud	44

Tabel C.14 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	45
Tabel C.15 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	45
Tabel C.16 Rincian Pembayaran Belanja Barang yang Masih Harus Dibayarkan	46
Tabel D.1 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	47
Tabel D.2 Rincian Beban Pegawai	49
Tabel D.3 Rincian Beban Persediaan	50
Tabel D.4 Rincian Beban Barang dan Jasa	51
Tabel D.5 Rincian Beban Pemeliharaan	52
Tabel D.6 Rincian Beban Perjalanan Dinas	53
Tabel D.7 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	53
Tabel D.8 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	54
Tabel E.1 Rincian Transaksi Antar Entitas	56



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN
MANAJEMEN KINERJA**

Jalan Dr. Mr. Teuku Muhammad Hasan, Darul Imarah, Aceh Besar 23352
Tlp. (0651) 8010900; Fax. 0651-7552568; Website : aceh.lan.go.id;

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pusjar SKMK yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Aceh Besar, 05 Mei 2026

Kepala,

Said Radhil, S.IP, MM

NIP. 19781207 200501 1 001

Laporan Keuangan Pusjar SKMK Tahun 2025 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp6.845.362.176 atau mencapai 100,33 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp6.823.030.000. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.689.029.182 atau mencapai 97,69 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp21.178.088.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp90.184.676.000 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp239.941.462, dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp89.944.734.538.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing - masing sebesar Rp31.451.809 dan Rp90.153.224.191.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.835.067.317, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp19.547.411.413 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp12.712.344.096. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing - masing sebesar Rp19.608.600 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp12.731.952.696.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp89.015.262.603, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp12.731.952.696, kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp26.247.278 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.843.667.006 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp90.153.224.191.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan - pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		% thd Angg	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	6.823.030.000	6.845.362.176	100,33	5.541.502.000
JUMLAH PENDAPATAN		6.823.030.000	6.845.362.176	100,33	5.541.502.000
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2.	9.874.076.000	9.738.234.203	98,62	8.379.869.779
Belanja Barang	B.3.	7.890.369.000	7.546.468.857	95,64	8.772.525.668
Belanja Modal	B.4.	3.413.643.000	3.404.326.122	99,73	453.634.000
JUMLAH BELANJA		21.178.088.000	20.689.029.182	97,69	17.606.029.447

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NERACA
2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET	C		
ASET LANCAR	C.1		
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.1	9.410.020	
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	2.960.947	14.842.176
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3	(14.805)	(14.210)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.4	2.946.142	14.767.966
Persediaan	C.1.5	227.585.300	221.173.232
Jumlah Aset Lancar		239.941.462	238.015.408
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	38.770.868.000	38.770.868.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	21.879.894.570	20.096.157.595
Gedung dan Bangunan	C.2.3	70.141.182.250	68.738.003.111
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	602.015.668	602.015.668
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	40.901.000	40.901.000
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.2.7	(31.590.209.958)	(29.397.363.121)
Jumlah Aset Tetap		89.944.734.538	88.850.645.253
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	-	20.000.000
Aset Lainnya	C.3.2	126.210.000	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(126.210.000)	(20.000.000)
Jumlah Aset Lainnya		(126.210.000)	-
JUMLAH ASET		90.184.676.000	89.086.680.661
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	28.949.726	66.294.448
Pendapatan Diterrima Dimuka	C.4.2	2.500.063	7.049.400
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		31.451.809	73.343.848
JUMLAH KEWAJIBAN		31.451.809	73.343.848
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	90.153.224.191	89.015.262.603
JUMLAH EKUITAS		90.153.224.191	89.015.262.603
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		90.184.676.000	89.086.680.451

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	6.835.067.317	5.533.591.600
JUMLAH PENDAPATAN		6.835.067.317	5.533.591.600
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	9.735.136.658	8.378.433.505
Beban Persediaan	D.3.	209.204.132	111.274.388
Beban Barang dan Jasa	D.4.	6.073.506.551	6.305.144.773
Beban Pemeliharaan	D.5.	818.914.914	584.640.763
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	411.652.526	1.706.959.787
Beban Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat	D.7.	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	2.299.056.837	2.343.728.564
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	(39.405)	74.210
JUMLAH BEBAN		19.547.411.413	19.430.255.990
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(12.712.344.096)	(13.896.664.390)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	-	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.1.	-	13.672.000
Pendapatan Pelepasan Aset non Lancar	D.10.2.	-	(6.132.814)
Beban Pelepasan Ase Non Lancar	D.10.3.	(20.914.600)	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.4.	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.5.	1.316.000	47.192.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.6.	(10.000)	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	D.10.7.	(19.608.600)	54.931.186
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(12.731.952.696)	(13.841.733.204)
Pos Luar Biasa			
Beban Luar Biasa	D.11.1	-	-
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	D.11.2	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		(12.731.952.696)	(13.841.733.204)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1.	89.015.262.603	90.801.921.624
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2.	(12.731.952.696)	(13.841.733.204)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.	26.247.278	(9.453.264)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2.	20.914.600	(9.453.264)
Koreksi Lain-lain	E.3.3.	5.332.678	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	13.843.667.006	12.064.527.447
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS		1.127.961.580	(1.786.659.021)
EKUITAS AKHIR	E.5.	90.153.224.191	89.015.262.603

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum Entitas
dan Rencana Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pusjar SKMK

Pendirian Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara pada Tanggal 11 Januari 2010 didasarkan pada kebutuhan daerah khususnya dari Pemerintah Aceh untuk melakukan penguatan sumber daya aparatur dan administrasi pemerintahan di daerahnya. Kebutuhan dari pemerintah daerah khususnya Pemerintah Aceh tersebut diimplementasikan dalam bentuk memfasilitasi dan memberikan hibah tanah untuk perkantoran, peminjaman sarana dan prasarana kantor serta dukungan sumber daya aparatur struktural dan staf bagi Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara. Pendirian Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara kemudian dikukuhkan melalui Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013.

Dalam rangka mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara (LAN), dilakukan berbagai langkah penataan organisasi yang dilandasi oleh dinamika kebutuhan birokrasi serta arah kebijakan nasional. Penataan tersebut secara formal dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara, yang kemudian diikuti dengan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara. Sejak saat itu, struktur organisasi LAN mengalami beberapa kali penyesuaian melalui Peraturan LAN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Administrasi Negara, hingga penetapan regulasi terbaru dalam Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN yang menjadi acuan saat ini.

Salah satu bentuk penataan kelembagaan tersebut adalah transformasi Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV menjadi Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN). Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2019, Puslatbang KHAN memiliki tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan aparatur sipil negara serta kajian di bidang hukum administrasi negara. Kelembagaan ini memainkan peran strategis dalam mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN, pengembangan kebijakan hukum administrasi negara, serta penguatan sistem pemerintahan daerah dan harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, Puslatbang KHAN juga berperan dalam merumuskan kebijakan pelatihan, menetapkan standar, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap akreditasi dan sertifikasi pelatihan ASN di tingkat nasional.

Seiring dengan penguatan fungsi kelembagaan di lingkungan LAN, penataan organisasi juga melahirkan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) yang secara struktural diatur dalam Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2025. Yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembelajaran ASN dan analisis di bidang strategi kebijakan manajemen kinerja, serta dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan berkedudukan di Aceh Besar. Keberadaan Pusjar SKMK menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas kinerja ASN yang berbasis pada pembelajaran berkelanjutan dan strategi kebijakan yang tepat sasaran. Melalui penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan kegiatan pembelajaran, pusat ini diharapkan mampu menjadi simpul penting dalam memperkuat tata kelola kinerja ASN yang profesional, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Dengan dilakukannya penataan organisasi dan tata kerja, LAN menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi dan berinovasi

dalam rangka mendukung transformasi kelembagaan pemerintah yang efektif, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Pembentukan dan penguatan unit-unit strategis menjadi wujud nyata peran LAN dalam memimpin pengembangan kapasitas aparatur dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan tersebut, Pusjar SKMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembelajaran dan penyusunan strategi kebijakan manajemen kinerja;
2. Pelaksanaan analisis di bidang strategi kebijakan manajemen kinerja;
3. Pelaksanaan pembelajaran ASN;
4. Pelaksanaan penyusunan strategi kebijakan manajemen kinerja;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran dan strategi kebijakan manajemen kinerja; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan, anggaran, sumber daya manusia, dan kerumahtanggaan.

A.1.1. Visi dan Misi

A.1.1.1. Visi

Visi Pusjar SKMK menggambarkan peranan dan fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kebijakan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Sebagai visi bersama (*sharevision*) maka cita-cita tersebut sekaligus menjadi tekad bagi semua pegawai Pusjar SKMK dalam melaksanakan tugasnya untuk senantiasa mengarah kepada pencapaian visi tersebut. Adapun pernyataan visi tersebut mengandung pengertian bahwa Pusjar SKMK bertekad untuk menjadi institusi yang senantiasa dijadikan rujukan oleh stakeholder.

Menjadi rujukan tersebut mengandung makna, Pusjar SKMK sebagai salah satu unit kerja LAN yang berkedudukan di daerah senantiasa berupaya untuk: berperan aktif (*motor*) dalam upaya mewujudkan

pembaharuan sistem administrasi negara yang berkualitas di daerah; mengambil peran sebagai penggagas (inisiator) guna menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistem administrasi negara di daerah; sekaligus maupun menjadi fasilitator yang senantiasa selalu bersinergi dan bermitra dengan semua stakeholder di daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas sistem administrasi negara di daerah; maupun sebagai mediator dalam upaya mewujudkan sinergitas antar semua elemen penyelenggara sistem administrasi di daerah. Dimana peran tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pengkajian kebijakan di bidang Manajemen Kinerja, pengembangan inovasi administrasi pemerintahan, dan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur di daerah secara berkualitas, inovatif dan profesional.

A.1.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusjar SKMK menetapkan misi yang ingin dicapai yaitu:

- a. Mendorong terwujudnya Kebijakan yang Berkualitas di Instansi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan Transformasi Pembelajaran ASN secara Terintegrasi;
- c. Menyelenggarakan Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN secara Kolaboratif;
- d. Menjamin Mutu tata Kelola Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN; dan
- e. Melaksanakan tata Kelola Organisasi yang Berkualitas dan Berorientasi pada Pengguna Layanan.

A.1.2. Tujuan dan Sasaran

A.1.2.1. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi diatas, maka Pusjar SKMK menetapkan tujuan organisasi sebagai berikut:

Untuk misi ke-1, tujuan yang akan dicapai adalah:

- a. Mewujudkan Kebijakan Publik dan Kapasitas ASN yang Berkualitas;

- a. Mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Berkualitas dan Berorientasi pada Pengguna Layanan.

A.1.2.2. Sasaran

Ukuran kinerja pencapaian tujuan organisasi dirumuskan dalam berbagai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas kebijakan Publik dan Kapasitas ASN;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola organisasi Berorientasi pada Pengguna Layanan.

A.1.3. Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi Pusjar SKMK terdiri dari 1 (satu) orang eselon II, dan 1 (satu) orang eselon III. Jumlah pegawai Pusjar SKMK seluruhnya sampai dengan saat ini sebanyak 65 (enam puluh lima) orang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4 (empat) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan 3 (tiga) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) . Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Pusjar SKMK per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- Kepala : Said Fadhil, S. IP, MM
- Kepala Bagian Umum : Edy Saputra, SH, MH

Pengelola Anggaran di Pusjar SKMK (Satker 680612) adalah sebagai berikut:

- Said Fadhil, S.IP, MM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang. Berdasarkan Keputusan Kepala Pusjar SKMK Nomor 01/KPAB.8/HKM.02.2/2026 tanggal 17 Maret 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satker 680612 di Lingkungan Pusjar SKMK TA 2025.
- Edy Saputra, SH, MH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Berdasarkan Keputusan Kepala Pusjar SKMK Nomor 019/KPAB.8/HKM.02.2/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker 680612 di Lingkungan Pusjar SKMK TA 2025.
- Ade Riandar Putra, SE sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusjar SKMK Nomor 019/KPAB.8/HKM.02.2/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satker 680612 di Lingkungan Pusjar SKMK TA 2025.

- Sayed Ahmad Zaki, S.T, M. T sebagai Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Pejabat Pemungut Penerimaan Negara.
Berdasarkan Keputusan Kepala Pusjar SKMK Nomor 019/KPAB.8/HKM.02.2/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Pejabat Pemungut Penerimaan Negara pada Satker 680612 di Lingkungan Pusjar SKMK TA 2025.
- Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan:
 1. Irza Aulia, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran.
 2. Nur Aqmal, A.Md sebagai Bendahara Penerimaan.
Berdasarkan Keputusan Kepala Pusjar SKMK Nomor 019/KPAB.8/HKM.02.2/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satker 680612 di Lingkungan Pusjar SKMK TA 2025.
- Anggota Tim Pengelola Anggaran:
 1. Agus Mulia Rahmat, A. Md
 2. Widya Maulina, S. Si
 3. Muhammad Rizky Al Ayyubi, A. Md, Ak
 4. Rinaldi, S.Sos
 5. Said Muhibi Arham, S.E
 6. Bagus Ginanjar, S.T
 7. Odywansa. S.E
 8. Riza Ofansha, S.T, M.T
Berdasarkan Keputusan Kepala Pusjar SKMK Nomor 019/KPAB.8/HKM.02.2/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Pengelola Keuangan, Pengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pengurus / Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Persediaan, dan Pengelola Barang dan Jasa.

Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 (Audited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pusjar SKMK. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pusjar SKMK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pusjar SKMK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Pusjar SKMK. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pusjar SKMK adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan lain-lain pada saat waktu terjadinya.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak / atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak

dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Berdasarkan PMK 225/05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Pusat.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.1
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan tagihan sejak tanggal Surat Pelunasan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu Bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagian Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

a. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel A.2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat

Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Seluruh Kewajiban pada Satker Pusjar SKMK diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek.
 - Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek seluruhnya merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga.
 - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pusjar SKMK telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel B.1
DIPA Awal Pendapatan sebelum dan sesudah revisi

Akun	Uraian	31 Desember 2025	
		Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi XI
	Pendapatan		
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.351.670.000	6.823.030.000
	Jumlah Pendapatan	4.351.670.000	6.823.030.000
	Belanja		
51	Belanja Pegawai	8.558.797.000	9.738.234.203
52	Belanja Barang	8.835.730.000	7.546.468.857
53	Belanja Modal	1.538.604.000	3.404.326.122
	Jumlah Belanja	18.933.131.000	20.689.029.182

DIPA Pusjar SKMK awal Tahun 2025 yang disahkan tanggal 02 Desember 2024 pagu belanja sebesar Rp18.933.131.000 dengan estimasi pendapatan PNBPN sebesar Rp5.166.160.000.

DIPA Revisi I pada tanggal 21 Februari 2025 merupakan revisi Blokir untuk menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 sehingga tidak ada perubahan pagu yaitu sebesar Rp18.933.131.000 dengan estimasi pendapatan PNBPN sebesar Rp5.166.160.000.

Pada DIPA Revisi II tanggal 27 Februari 2025 merupakan revisi penyesuaian belanja terkait hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 sehingga tidak ada perubahan pagu yaitu sebesar Rp18.933.131.000 dengan estimasi pendapatan PNBPN sebesar Rp5.166.160.000.

Pada Revisi III tanggal 19 April 2025 merupakan revisi penyesuaian rencana penarikan dana untuk meminimalisir angka deviasi

perencanaan dan realisasi sehingga tidak ada perubahan pagu yaitu sebesar Rp18.933.131.000 dengan estimasi pendapatan PNBPN sebesar Rp5.166.160.000.

Pada Revisi IV tanggal 22 April 2025 masih merupakan revisi penyesuaian rencana penarikan dana untuk meminimalisir angka deviasi perencanaan dan realisasi sehingga tidak ada perubahan pagu yaitu sebesar Rp18.933.131.000 dengan estimasi pendapatan PNBPN sebesar Rp5.166.160.000.

Pada Revisi V tanggal 27 Mei 2025 merupakan revisi terkait perubahan nomenklatur dan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dari Puslatbang KHAN menjadi Pusjar SKMK sehingga perlu merubah Rincian Output (RO) menyesuaikan nomenklatur dan SOTK baru dan juga terdapat revisi penambahan Belanja Pegawai sebesar Rp150.000.000 sehingga pagu Pusjar SKMK secara keseluruhan menjadi Rp19.083.131.000.

Pada Revisi VI tanggal 14 Juli 2025 merupakan revisi penyesuaian rencana penarikan dana untuk meminimalisir angka deviasi perencanaan dan realisasi sehingga tidak ada perubahan pagu yaitu sebesar Rp19.083.131.000 dengan estimasi pendapatan PNBPN sebesar Rp5.166.160.000.

Pada Revisi VII tanggal 19 Agustus 2025 terdapat revisi pemanfaatan pagu anggaran blokir, revisi ini tidak mengubah pagu Pusjar SKMK sehingga pagu Pusjar SKMK secara keseluruhan adalah Rp19.083.131.000.

Pada Revisi VIII tanggal 19 Agustus 2025 merupakan revisi penyesuaian penyesuaian komposisi di akun honorarium pelatihan dan tidak menambah anggaran belanja sehingga tidak ada perubahan pagu yaitu sebesar Rp19.083.131.000 dengan estimasi pendapatan PNBPN sebesar Rp5.166.160.000.

Pada Revisi IX tanggal 29 September 2025 terdapat revisi penambahan pendapatan PNBPN sebesar Rp1.656.870.000 dan penambahan belanja sebesar Rp1.408.339.000 sehingga pagu Pusjar SKMK secara keseluruhan menjadi Rp20.491.470.000 dan estimasi pendapatan PNBPN sebesar Rp6.823.030.000.

Pada Revisi X tanggal 14 Oktober 2025 merupakan revisi penyesuaian

rencana penarikan dana untuk meminimalisir angka deviasi perencanaan dan realisasi sehingga tidak ada perubahan pagu yaitu sebesar Rp20.491.470.000 dan estimasi pendapatan PNBPN sebesar Rp6.823.030.000.

Pada Revisi XI tanggal 06 November 2025 terdapat revisi penambahan belanja sebesar Rp686.618.000 serta terdapat revisi pemanfaatan pagu anggaran blokir sehingga pagu Pusjar SKMK secara keseluruhan menjadi Rp21.178.088.000 dan estimasi pendapatan PNBPN sebesar Rp6.823.030.000.

Pada Revisi XII tanggal 12 Desember 2025 terdapat revisi pemanfaatan pagu anggaran blokir sehingga pagu Pusjar SKMK secara keseluruhan menjadi Rp21.178.088.000 dan estimasi pendapatan PNBPN sebesar Rp6.823.030.000.

Pada Revisi XIII tanggal 12 Desember 2025 terdapat revisi pemanfaatan pagu anggaran blokir dan revisi pergeseran antar jenis belanja sehingga pagu Pusjar SKMK secara keseluruhan menjadi Rp21.178.088.000 dan estimasi pendapatan PNBPN sebesar Rp6.823.030.000.

Pada Revisi XIV Tanggal 19 Januari 2026 merupakan revisi penyesuaian rencana penarikan dana untuk meminimalisir angka deviasi perencanaan dan realisasi sehingga tidak ada perubahan pagu sebesar Rp21.178.088.000 dan estimasi pendapatan PNBPN sebesar Rp6.823.030.000.

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 masih terdapat pagu blokir sebesar Rp309.184.000 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel B.2
Pagu Blokir Per 31 Desember 2025*

	Satker	Pagu Anggaran	Pagu Blokir
1	Pusjar SKMK	21.178.088.000	309.184.000
	Jumlah Pendapatan	21.178.088.000	309.184.000

Pagu Blokir Pusjar SKMK hingga akhir Tahun Anggaran 2025 tidak diberikan persetujuan buka blokir dari Kementerian Keuangan dikarenakan pagu tersebut merupakan pagu belanja perjalanan dinas yang secara khusus dilakukan pengendalian dan pengetatan belanja tersebut oleh Kementerian Keuangan, sehingga secara akuntansi tetap tercatat sebagai pagu blokir dan belum dapat direalisasikan.

Realisasi Pendapatan

Rp6.845.362.176

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Neto untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.845.362.176 atau mencapai 100,33 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6.823.030.000.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel B.3
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Akun	Uraian	31 Desember 2025		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	208.240.000	211.725.000	101,67
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	6.614.790.000	6.578.790.000	99,46
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	-	40.000.000	100,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	2.262.976	100,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	12.579.200	100,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	5.000	100,00
	Jumlah	6.823.030.000	6.845.362.176	100,33

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 secara umum mengalami kenaikan sebesar Rp1.296.375.176 atau 23,39%. Kenaikan tersebut disebabkan terjadinya kenaikan yang cukup signifikan pada Pendapatan Layanan Pendidikan/atau Pelatihan terkait penambahan jumlah kelas untuk Pelatihan Dasar CPNS.

Tabel B.4
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	Uraian	Realisasi	Realisasi	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
		31 Des 2025	31 Des 2024		
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan SBN Lainnya	-	11.872.000	(11.872.000)	(100,00)
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	208.240.000	278.730.000	(70.490.000)	(25,29)
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	6.614.790.000	5.248.620.000	1.366.170.000	26,03
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	2.262.976	-	2.262.976	100,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	12.579.200	-	12.579.200	100,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	5.000	-	5.000	100,00
425439	Pendapatan Denda Lainnya	-	280.000	(280.000)	(100,00)
	Jumlah	6.837.877.176	5.541.502.000	1.296.375.176	23,39

Pendapatan dari
Pengelolaan BMN
Rp211.725.000

B.1.1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN

Tabel B.5
*Perbandingan Realisasi Pendapatan, Pengelolaan BMN,
Iuran Badan Usaha 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Akun	Uraian	31 Des 2025		31 Des 2024	Nakl (Turun)	% Nakl (Turun)
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	Realisasi		
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	13.872.000	(13.872.000)	-
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	208.240.000	211.725.000	278.730.000	(67.005.000)	(24,04)
	Jumlah	208.240.000	211.725.000	292.602.000	(80.877.000)	(27,64)

Realisasi Pendapatan Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp211.725.000 atau 101,67 persen dari estimasinya sebesar Rp208.240.000. Realisasi ini pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp80.877.000 atau 27,64 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 tidak dilakukan lelang BMN peralatan dan mesin, sehingga tidak adanya realisasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya untuk Tahun 2025. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp211.725.00 merupakan pendapatan kegiatan sewa sarana dan prasarana kantor.

Pendapatan Pendidikan,
Budaya, Riset dan
Teknologi
Rp6.618.790.000

B.1.2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

Tabel B.6
*Perbandingan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Riset
dan Teknologi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Akun	Uraian	31 Des 2025		31 Des 2024	Nakl (Turun)	% Nakl (Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan	6.614.790.000	6.578.790.000	5.248.620.000	1.330.170.000	25,34
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	-	40.000.000	-	40.000.000	100,00
	Jumlah	6.614.790.000	6.618.790.000	5.248.620.000	1.370.170.000	26,11

Realisasi Neto Pendapatan Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi adalah sebesar Rp6.618.790.000 atau 101,67 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp6.614.790.000. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024, Pendapatan Pendidikan dan/atau Pelatihan mengalami kenaikan sebesar Rp1.370.170.000 atau 26,11 persen, hal ini disebabkan pada Tahun 2025 untuk Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan sebanyak 13 Angkatan, sedangkan pada Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 1 Angkatan dan untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas pada Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) angkatan, sedangkan pada Tahun 2023 hanya 1 Angkatan, dan tidak pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas pada Tahun 2024. Selain itu pada Tahun 2025 Pusjar SKMK mengadakan Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan sebanyak 2 Angkatan, dan juga tidak ada pelaksanaan Pelatihan tersebut pada Tahun 2025.

Pendapatan Lain-lain
Rp14.847.176

B.1.3. Pendapatan Lain-lain

Tabel B.7
*Perbandingan Realisasi Pendapatan Lain-lain
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Akun	Uraian	31 Des 2025		31 Des 2024	Hakik (Turun)	% Naik (Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	2.262.976	-	2.262.976	100
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	12.579.200	-	12.579.200	100
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	5.000	-	5.000	100
425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	-	280.000	(280.000)	(100,00)
	Jumlah	-	14.847.176	280.000	14.567.176	5,102,56

Realisasi Pendapatan Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.847.176. Pada Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp2.262.976 merupakan pengembalian atas uang makan PNS bulan desember 2024 sebesar Rp185.000, pengembalian tunjangan kinerja PNS bulan oktober 2024 sebesar Rp1.472.574, pengembalian tunjangan kinerja PNS bulan desember 2024 sebesar Rp492.402, dan pengembalian uang lembur PNS sebesar Rp114.000.

Pada Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar 12.579.200 merupakan pengembalian temuan atas audit dari APIP periode tahun 2024 atas pengembalian honor evaluasi akademik sebesar Rp1.020.000, pengembalian honor penceramah sebesar Rp1.190.000, pengembalian honor pengajar sebesar Rp1.710.000, pengembalian honor widyaiswara sebesar Rp6.120.000, pengembalian honor pengelola keuangan sebesar Rp1.459.200, dan pengembalian kelebihan uang harian perjalanan dinas sebesar Rp1.080.000.

Sedangkan pada Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp5.000, merupakan kelebihan pembayaran biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Realisasi Belanja
Rp20.689.029.182

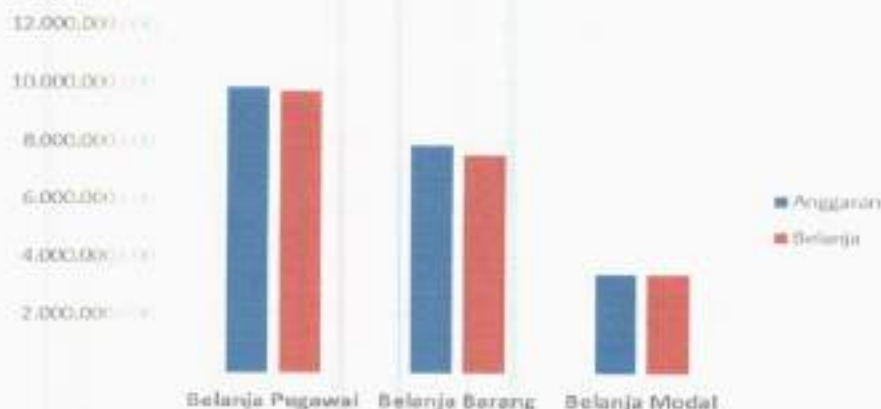
B.2. Belanja

Realisasi Belanja Pusjar SKMK per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.689.029.182 atau 97,69 persen dari anggaran belanja sebesar Rp21.178.088.000. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 8.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	9.874.076.000	9.742.398.752	98,67
Belanja Barang	7.890.369.000	7.548.489.857	95,67
Belanja Modal	3.413.643.000	3.404.326.122	99,73
Total Belanja Kotor	21.178.088.000	20.695.214.731	97,72
Pengembalian	-	(6.185.549)	-
Jumlah	21.178.088.000	20.689.029.182	97,69

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.9
Rincian Belanja Berdasarkan Program per 31 Desember 2025

Program	31 Desember 2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	3.412.902.000	3.076.121.930	90,13
Program Dukungan Manajemen	17.765.186.000	17.619.092.801	99,18
Jumlah Belanja	21.178.088.000	20.695.214.731	97,72
Pengembalian Belanja	-	(6.185.549)	
Jumlah Belanja	21.178.088.000	20.689.029.182	97,69

Realisasi belanja Tahun 2025 secara umum mengalami kenaikan sebesar Rp3.082.999.735 atau 17,51 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2024.

Kenaikan realisasi belanja terjadi pada belanja pegawai dan belanja modal, sementara realisasi belanja barang terjadi penurunan.

Tabel 8.10
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Des 2025	Realisasi 31 Des 2024	Naik (Turun) %	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	9.738.234.203	8.379.869.779	1.358.364.424	16,21
Belanja Barang	7.546.468.857	8.772.525.668	(1.226.056.811)	(13,98)
Belanja Modal	3.404.326.122	453.634.000	2.950.692.122	650,46
Jumlah	20.689.029.182	17.606.029.447	3.082.999.735	17,51

Belanja Pegawai
Rp9.738.234.203

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.738.234.203 dan Rp8.379.869.779.

Tabel 8.11
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Des 2025	Realisasi 31 Des 2024	Naik (Turun) %	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.426.243.801	8.280.218.650	1.146.025.151,00	13,84
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	316.154.951	104.162.403	211.992.548,00	203,52
Jumlah Belanja Kotor	9.742.398.752	8.384.381.053	1.358.017.699,00	16,20
Pengembalian Belanja Pegawai	(4.164.549)	(4.511.274)	346.725,00	(7,69)
Jumlah Belanja	9.738.234.203	8.379.869.779	1.358.364.424	16,21

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang diangkat sebagai pegawai lingkup

pemerintahan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

B.2.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Tabel B.12
Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025		31 Des 2024	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Gaji Pokok	2.954.425.000	2.945.766.440	2.922.728.900	23.037.540	0,79
Belanja Pemb. Gaji	47.000	43.161	44.167	(1.006)	(2,28)
Belanja Tunj. Suami/Istri	237.171.000	235.958.336	238.235.650	(2.277.314)	(0,96)
Belanja Tunj. Anak	67.362.000	66.914.092	66.064.820	849.272	1,29
Belanja Tunj. Struktural	63.140.000	63.140.000	63.140.000	-	-
Belanja Tunj. Fungsional	447.212.000	446.072.000	418.306.000	27.766.000	6,64
Belanja Tunj. IPh	33.432.000	33.313.655	32.720.562	593.093	1,81
Belanja Tunj. Beras	172.579.000	172.576.860	172.866.540	(289.680)	(0,17)
Belanja Uang Makan	492.319.000	485.428.000	474.419.000	11.009.000	2,32
Belanja Tunj. Umum PNS	49.625.000	48.330.000	51.455.000	(3.125.000)	(6,07)
Jumlah	4.517.312.000	4.497.542.544	4.439.980.639	57.561.905	1,30
Pengembalian	-	(740.337)	(4.511.274)		
Jumlah Neto	4.517.312.000	4.496.802.207	4.435.469.365	61.332.842	1,38

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per 31 Desember 2025 dianggarkan sebesar Rp4.517.312.000 dan realisasi netto mencapai Rp4.496.802.207 atau 99,55 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024, maka realisasi 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp57.561.905 atau 1,30 persen. Hal ini disebabkan antara lain adanya penerimaan CPNS baru di Pusjar SKMK sebanyak 3 orang, kenaikan jenjang untuk jabatan fungsional, pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional dan kenaikan pangkat yang turut menyumbang kenaikan pada belanja gaji dan tunjangan PNS.

B.2.1.2. Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Tabel 8.13
Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025		31 Des 2024	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Gaji Pokok PPPK	113.919.000	113.916.649	38.443.200	75.473.449	196,32
Belanja Pemb. Gaji PPPK	6.000	2.196	716	1.480	206,70
Belanja Tunj. Suami/Istri	4.605.000	4.604.416	-	4.604.416	100,00
Belanja Tunj. Anak PPPK	1.383.000	1.381.324	-	1.381.324	100,00
Belanja Tunj. Fungsional	7.560.000	7.560.000	6.480.000	1.080.000	16,67
Belanja Tunj. Beras	6.327.000	6.324.680	869.040	5.455.640	627,78
Belanja Uang Makan	28.217.000	26.481.000	7.326.000	19.355.000	264,20
Belanja Tunj. Umum PPPK	4.950.000	4.950.000	-	4.950.000	100,00
Jumlah	166.967.000	165.420.265	53.118.956	112.301.309	211,41
Pengembalian	-	-	-	-	-
Jumlah Neto	166.967.000	165.420.265	53.118.956	112.301.309	211,41

Belanja gaji dan tunjangan PPPK per 31 Desember 2025 dianggarkan sebesar Rp166.967.000 dan realisasi neto mencapai Rp165.420.265 atau 99,07 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024, belanja gaji dan tunjangan PPPK mengalami kenaikan sebesar Rp112.301.309 atau 211,41 persen. Hal ini disebabkan karena Pusjar SKMK baru menerima PPPK baru sebanyak 3 orang yang menyebabkan kenaikan signifikan pada realisasi belanja gaji dan tunjangan PPPK.

B.2.1.3. Belanja Gaji Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

Tabel 8.14
Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja
Pegawai Transito
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025		31 Des 2024	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5.026.855.000	4.928.701.257	3.828.745.011	1.099.956.246	28,73
Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	154.942.000	150.734.686	51.043.447	99.691.239	195,31
Jumlah	5.181.797.000	5.079.435.943	3.879.788.458	1.199.647.485	30,92
Pengembalian	-	(3.424.212)	-	-	-
Jumlah Neto	5.181.797.000	5.076.011.731	3.879.788.458	1.196.223.273	30,83

Belanja tunjangan khusus & belanja pegawai transito per 31 Desember 2025 dianggarkan sebesar Rp5.181.797.000 dan realisasi neto mencapai Rp5.076.011.731. Bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 Belanja tunjangan khusus & belanja pegawai transito mengalami kenaikan sebesar Rp1.196.223.273 atau 30,83 persen. Hal ini disebabkan diantaranya terdapat pembayaran tunjangan kinerja untuk pegawai PPPK baru sebanyak 3 orang, pembayaran tunjangan kinerja untuk CPNS sebanyak 3 orang, terdapat beberapa PNS yang mengalami kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu, dan juga ada beberapa pegawai yang diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional tertentu.

Belanja Barang
Rp7.546.468.857

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.546.468.857 dan Rp8.772.525.668.

Tabel 8.15
Perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	(Turun)	(Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.266.892.303	2.270.900.813	(4.008.510)	(0,18)
Belanja Barang Non Operasional	2.951.687.973	2.987.596.850	(33.908.877)	(1,13)
Belanja Barang Persediaan	29.885.000	76.152.000	(46.267.000)	(60,76)
Belanja Jasa	883.010.741	1.037.250.105	(154.239.364)	(14,87)
Belanja Pemeliharaan	1.001.340.314	692.586.113	308.754.201	44,58
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	413.673.526	1.486.921.562	(1.073.248.036)	(72,18)
Jumlah Belanja Kotor	7.546.489.857	8.551.407.443	(1.002.917.586)	(11,73)
Pengembalian Belanja	(2.021.000)	-	(2.021.000)	-
Jumlah Belanja	7.546.468.857	8.551.407.443	(1.004.938.586)	(11,75)

Belanja Barang adalah pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan termasuk untuk biaya pemeliharaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan perjalanan dinas.

B.2.2.1. Belanja Barang Operasional

Tabel 8.16
Perbandingan Realisasi Belanja Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025		31 Des 2024	Naik (Turun)	Naik (Turun) %
	Anggaran	Realisasi	Realisasi		
Belanja Keperluan Perhubungan	2.138.632.000	2.137.386.303	2.190.581.413	(53.195.110)	(2,43)
Belanja Penginapan Surat Dinas Pos-Pusat	15.300.000	16.106.000	3.727.400	12.378.600	332,10
Honor Operasional Satker	113.400.000	113.400.000	76.592.000	36.808.000	48,06
Jumlah Bruto	2.271.332.000	2.266.892.303	2.270.900.813	(4.008.510)	(0,18)
Pengembalian	-	-	-	-	-
Jumlah Netto	2.271.332.000	2.266.892.303	2.270.900.813	(4.008.510)	(0,18)

Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2025 dianggarkan sebesar Rp2.271.332.000 dan realisasi neto mencapai Rp2.266.892.813 atau 99,80 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 Belanja Barang Operasional mengalami penurunan sebesar Rp4.008.510 atau 0,18 persen. Hal ini disebabkan adanya penurunan belanja honor operasional satuan kerja akibat adanya perubahan ketentuan besaran persentase honorarium pengelola yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024, penurunan belanja pengiriman surat dinas pos pusat karena penggunaan aplikasi Srikandi sebagai media pengiriman surat dinas antar instansi pemerintah, dan menurunnya belanja keperluan perkantoran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti penurunan pembayaran honorarium PPNPN yang disebabkan oleh penurunan jumlah PPNPN pada tahun 2025 sebanyak 3 orang yang diangkat sebagai PPPK pada satker Pusjar SKMK.

B.2.2.2. Belanja Barang Non Operasional

Tabel B.17
Perbandingan Realisasi Belanja Non Operasional
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025		31 Des 2024	Naik (Turun)	Naik (Turun) %
	Anggaran	Realisasi	Realisasi		
Belanja Bahan	1.305.207.000	1.304.748.000	1.413.574.600	(108.826.600)	(7,70)
Honor Output Kegiatan	1.219.000.000	1.225.188.000	946.800.000	278.388.000	29,42
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	274.264.000	271.880.973	533.298.250	(259.417.277)	(48,64)
Belanja Peralatan dan Mesin-Ekstrakomputer	149.675.000	149.675.000	93.924.000	55.751.000	59,36
Jumlah Bruto	2.968.146.000	2.953.687.973	2.987.596.850	(33.908.877)	(1,13)
Pengembalian	-	-	-	-	-
Jumlah Netto	2.968.146.000	2.953.687.973	2.987.596.850	(33.908.877)	(1,13)

Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2025 dianggarkan sebesar Rp2.968.146.000 dan realisasi neto mencapai Rp2.953.687.973 atau 99,51 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 Belanja Barang Non Operasional mengalami penurunan sebesar Rp33.908.877 atau 1,13 persen. Hal ini disebabkan adanya penurunan anggaran belanja non operasional pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, adanya kebijakan terkait penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS yang dilaksanakan pada tahun 2025 secara *Blended Learning*, sehingga mengakibatkan penurunan belanja bahan.

B.2.2.3. Belanja Barang untuk Barang Persediaan

Tabel B.18
Perbandingan Realisasi Belanja untuk Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025		31 Des 2024	Naik (Turun)	Naik (Turun) %
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Barang Persediaan untuk Barang Konsumsi	29.886.000	29.885.000	76.152.000	(46.267.000)	(60,76)
Jumlah	29.886.000	29.885.000	76.152.000	(46.267.000)	(60,76)
Pengembalian	-	-	-	-	-
Jumlah Netto	29.886.000	29.885.000	76.152.000	(46.267.000)	(60,76)

Belanja Barang untuk Persediaan 31 Desember 2025 dianggarkan sebesar Rp29.886.000 dan realisasi Rp29.885.000 atau 100 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024 maka realisasi mengalami penurunan sebesar Rp46.267.000 atau 60,76 persen. Hal ini dikarenakan menurunnya pemenuhan kebutuhan barang konsumsi pada tahun 2025.

B.2.2.4. Belanja Jasa

Tabel B.19
Perbandingan Realisasi Belanja Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025		31 Des 2024	Naik (Turun)	Naik (Turun) %
	Anggaran	Realisasi	Realisasi		
Belanja Langganan Listrik	482.789.000	482.567.625	673.643.706	(191.076.081)	(28,36)
Belanja Langganan Telepon	25.110.000	24.975.671	26.209.653	(1.233.782)	(4,71)
Belanja Langganan Air	1.410.000	1.374.800	450.000	924.800	205,31
Belanja Sewa	186.088.000	185.292.445	179.546.746	5.745.699	3,20
Belanja Jasa Profesi	186.300.000	179.800.000	153.800.000	26.000.000	16,91
Belanja Jasa Lainnya	9.000.000	9.000.000	3.600.000	5.400.000	-
Jumlah Bruto	892.703.000	883.010.741	1.037.250.105	(154.239.364)	(14,87)
Pengembalian	-	-	-	-	-
Jumlah Netto	892.703.000	883.010.741	1.037.250.105	(154.239.364)	(14,87)

Belanja Jasa 31 Desember 2025 dianggarkan sebesar Rp892.703.000 dan realisasi neto mencapai Rp883.010.741 atau 98,91 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024, maka realisasi 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp154.239.364 atau 14,87 persen. Hal ini disebabkan penurunan signifikan pada belanja langganan listrik, yaitu karena pelaksanaan Pelatihan dilakukan secara Blended Learning sehingga penggunaan Listrik di sarana dan prasarana Gedung pelatihan menurun.

B.2.2.5. Belanja Pemeliharaan

Tabel B.20
Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025		31 Des 2024	Naik (Turun)	Naik (Turun)%
	Anggaran	Realisasi	Realisasi		
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	382.968.000	382.391.975	242.376.000	140.015.975	57,77
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.700.000	100.692.500	87.617.000	13.075.500	14,92
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	399.680.000	398.135.839	312.800.113	85.285.726	27,26
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.120.000	120.120.000	49.743.000	70.377.000	141,48
Jumlah Bruto	1.003.468.000	1.001.340.314	692.566.113	308.754.201	44,58
Pengembalian					
Jumlah Netto	1.003.468.000	1.001.340.314	692.566.113	308.754.201	44,58

Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dianggarkan sebesar Rp1.003.468.000 dan realisasi neto Rp1.001.340.314 atau 99,79 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024 maka realisasi 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp308.754.201 atau 44,58 persen. Hal ini terjadi karena meningkatnya belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan instalasi jaringan internet dan Lift, renovasi kamar, pemeliharaan lift, pompa mesin pemadam kebakaran, genset 500 KVA dan pemeliharaan AC sentral.

B.2.2.6. Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Tabel B.21
Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025		31 Des 2024	Naik (Turun)	Naik (Turun)%
	Anggaran	Realisasi	Realisasi		
Belanja Perjalanan Bisnis	699.840.000	389.857.866	1.486.921.562	(1.097.063.696)	(73,78)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	850.000	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	24.144.000	23.815.660	-	23.815.660	-
Jumlah Bruto	724.834.000	413.673.526	1.486.921.562	(1.073.248.036)	(72,18)
Pengembalian	-	(2.021.000)	-	-	-
Jumlah Netto	724.834.000	411.652.526	1.486.921.562	-1.073.248.036	(72,32)

Belanja Perjalanan Dalam Negeri periode 31 Desember 2025 dianggarkan sebesar Rp724.834.000 dan realisasi neto Rp411.652.526

atau 56,79 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024, maka realisasi 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.073.248.036 atau 72,32 persen. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan anggaran sesuai arahan Presiden tentang efisiensi anggaran perjalanan dinas Kementerian dan Lembaga.

Belanja Modal
Rp3.404.326.122

B.2.3. Belanja Modal

Tabel B.22
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025		31 Des 2024	Naik (Turun)	Naik (Turun) %
	Anggaran	Realisasi	Realisasi		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.990.667.000	1.989.946.983	388.286.000	1.601.660.983	412,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.298.000	78.071.029	1.591.000	76.480.029	4.807,04
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.344.678.000	1.336.308.110	63.757.000	1.272.551.110	1.995,94
Jumlah Bruto	3.413.643.000	3.404.326.122	453.634.000	2.950.692.122	650,46
Pengembalian	-	-	-	-	-
Jumlah Netto	3.413.643.000	3.404.326.122	453.634.000	2.950.692.122	650,46

Realisasi belanja modal periode 31 Desember 2025 dan periode 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.404.326.122 dan Rp453.634.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel B.23
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025		31 Des 2024	Naik (Turun)	Naik (Turun) %
	Anggaran	Realisasi	Realisasi		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.990.667.000	1.989.946.983	388.286.000	1.601.660.983	412,50
Jumlah Bruto	1.990.667.000	1.989.946.983	388.286.000	1.601.660.983	412,50
Pengembalian	-	-	-	-	-
Jumlah Netto	1.990.667.000	1.989.946.983	388.286.000	1.601.660.983	412,50

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin periode 31 Desember 2025 dianggarkan sebesar Rp1.990.667.000 dan realisasi neto sebesar Rp1.989.946.983 atau 99,96 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi periode 31 Desember 2024, maka realisasi 31 Desember 2025

mengalami kenaikan sebesar Rp1.601.660.983 atau 412,50 persen. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan anggaran belanja modal peralatan dan mesin akibat kenaikan kebutuhan pemenuhan peralatan dan mesin untuk menunjang pekerjaan terutama untuk menunjang kegiatan pelatihan di Satker Pusjar SKMK.

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel B.24
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025		31 Des 2024	Naik (Turun)	Naik (Turun) %
	Anggaran	Realisasi	Realisasi		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.298.000	78.071.029	1.591.000	76.480.029	4.807,04
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.344.678.000	1.336.308.110	63.757.000	1.272.551.110	1.995,94
Jumlah Bruto	1.422.976.000	1.414.379.139	65.348.000	1.349.031.139	2.064,38
Pengembalian	-	-	-	-	-
Jumlah Netto	1.422.976.000	1.414.379.139	65.348.000	1.349.031.139	2.064,38

Realisasi belanja modal Gedung dan bangunan periode 31 Desember 2025 dianggarkan sebesar Rp1.422.976.000 dan realisasi netto sebesar Rp1.414.379.139 atau 99,73 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi periode 31 Desember 2024, maka realisasi 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.349.031.139 atau 2.064,38 persen. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan diantaranya untuk renovasi Auditorium, renovasi mini teater, renovasi atap Gedung kantor, dan pengadaan kanopi parkir.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Ringkasan Neraca Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel C
Neraca*

Uraian	2025	2024
ASET LANCAR		
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	9.410.020	-
Piutang Bukan Pajak	2.960.947	14.842.176
Penysihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(14.805)	(74.210)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	2.946.142	14.767.966
Persediaan	227.585.300	223.173.232
JUMLAH ASET LANCAR	239.941.462	237.941.198
ASET TETAP		
Tanah	28.770.868.000	28.770.868.000
Peralatan dan Mesin	21.979.894.578	20.096.157.595
Gedung dan Bangunan	70.141.182.250	68.738.003.111
Jalan, Irigasi dan Jaringan	602.018.668	602.018.668
Aset Tetap Lainnya	40.981.000	40.981.000
AKUMULASI PENYUSUNAN	(31.590.209.958)	(29.397.363.121)
JUMLAH ASET TETAP	89.944.734.538	88.850.665.253
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	-	20.000.000
Aset Lain-lain	126.210.000	-
AKUMULASI PENYUSUTAN / AMORTISASI ASET LAINNYA	(126.210.000)	(20.000.000)
JUMLAH ASET LAINNYA	-	-
Jumlah Aset	90.184.676.000	89.088.606.451
Utang kepada Pihak Ketiga	28.949.726	66.294.448
Pendapatan Diterima Dimuka	2.502.083	7.049.400
Jumlah Kewajiban	31.451.809	73.343.848
Ekuitas	90.153.224.191	89.015.262.603
Jumlah Ekuitas	90.153.224.191	89.015.262.603
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	90.184.676.000	89.088.606.451

Aset Lancar
Rp239.941.462

C.1. ASET LANCAR

Jumlah Aset Lancar Pusjar SKMK Tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp239.941.462 dan Rp237.941.198.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid)
Rp9.410.020

C.1.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) adalah pengeluaran kas oleh entitas pemerintah untuk membayar barang atau jasa sebelum manfaat atau jasanya diterima. Artinya, meskipun pembayaran sudah dilakukan, manfaatnya belum atau belum sepenuhnya digunakan dalam periode pelaporan saat ini.

Nilai Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp9.410.020 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.1
Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Persediaan	2025	2024
Saldo Awal	5.332.678	-
Pembayaran Annual Fee 2025 dan BY Journal Article Desember 2024	(507.498)	-
Pembayaran CY Journal Article January 2025	(124.362)	-
Pembayaran CY Journal Article August 2025	(139.048)	-
Pembayaran Langganan Canva	4.015.000	-
Pembayaran Langganan Capcut	833.250	-
Jumlah	9.410.020	-

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan belanja langganan keanggotaan DOI (Digital Object Identifier) selama setahun, dan juga terdapat belanja langganan aplikasi Canva dan aplikasi Capcut untuk periode Desember 2025 sampai dengan November 2026 sesuai dengan temuan dari pemeriksaan Tim BPK RI. Pusjar SKMK selama ini belum pernah mencatat biaya tahunan keanggotaan DOI didalam Laporan Keuangan, baru pada Laporan Keuangan Tahun 2025 ini biaya keanggotaan langganan DOI dicatat.

Piutang Bukan Pajak
Rp2.960.947

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp2.960.947 dan Rp14.842.176 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.2
Piutang Bukan Pajak

Keterangan	2025	2024
Piutang Lainnya	2.960.947	14.842.176
Piutang PNDP	-	-
Jumlah	2.960.947	14.842.176

Untuk piutang lainnya sebagaimana yang tersebut adalah pengembalian uang makan PNS bulan desember sebesar Rp364.000 untuk 4 orang PNS, pengembalian tunjkin PNS bulan desember sebesar Rp703.068 untuk 13 orang PNS dan pengembalian tunjkin PPPK bulan desember sebesar Rp43.879 untuk 3 orang PPPK. Dan juga berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK RI, terdapat pengembalian tunjangan umum atas pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebesar Rp370.000 selama dua bulan, dan pengembalian tunjangan umum atas pegawai yang melaksanakan cuti besar (Ibadah Haji) selama tiga bulan sebesar Rp1.480.000. Untuk semua piutang tersebut telah dilakukan pembayaran pada tahun anggaran 2026. Berikut rincian pembayarannya.

Tabel C.3
Rincian Piutang Lainnya

No	KETERANGAN	TANGGAL	SP2D / NTPN	JUMLAH
1	Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2025	20-01-2026	48C203CIG6FNBS6L	364.000
2	Pengembalian Tunjkin PNS & Tunjkin PPPK Bulan Desember 2025	20-01-2026	A04020NADM014S4P	746.947
3	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Umum PNS Tugas Belajar	08-04-2026	336863CIG6O93L55	370.000
4	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Umum PNS Cuti Besar	21-04-2026	C56B249001B1LP02	1.110.000
5	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Umum PNS Cuti Besar	22-04-2026	26001000001817	370.000
JUMLAH				2.960.947

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
Piutang Bukan Pajak
(Rp14.805)

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar minus Rp14.805 dan minus Rp74.210. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Persediaan

Rp227.585.300

C.1.4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan Tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp227.585.300 dan Rp223.173.232. terdapat penyesuaian nilai persediaan berupa BBM Genset sebesar Rp1.426.000 berdasarkan hasil temuan BPK RI.

Rincian Persediaan Tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.4
Rincian Persediaan

Persediaan	2025	2024
Barang Konsumsi	175.288.200	186.216.032
Bahan untuk Pemeliharaan	52.297.100	36.957.200
Jumlah	227.585.300	223.173.232

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp89.944.734.538

C.2. ASET TETAP

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Pusjar SKMK berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Jumlah Aset Tetap Pusjar SKMK Tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp89.944.734.538 dan Rp88.850.665.253

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

Tabel C.5
Rincian Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	2025	2024
Tanah	28.770.868.000	28.770.868.000
Peralatan dan Mesin	21.979.894.578	20.096.157.595
Gedung dan Bangunan	70.141.182.250	68.738.003.111
Jalan, Irigasi dan Jaringan	602.018.668	602.018.668
Aset Tetap Lainnya	40.981.000	40.981.000
Aset Tetap Sebelum Penyusutan	121.534.944.496	118.248.028.374
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(31.590.209.958)	(29.397.363.121)
Jumlah Aset Tetap	89.944.734.538	88.850.665.253

Tanah

Rp28.770.868.000

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pusjar SKMK pada Tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp28.770.868.000 dan Rp28.770.868.000. Nilai Aset Tetap berupa Tanah Tahun 2025 dan tahun 2024 tidak mengalami perubahan, hal ini disebabkan karena tidak ada penambahan belanja modal untuk menambah nilai aset tanah tersebut. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

*Tabel C.6
Rincian Tanah*

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	28.770.868.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Hibah	-
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	28.770.868.000
Akumulasi Penyusutan s.d per 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per per 31 Desember 2025	28.770.868.000

Rincian saldo Tanah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1.	25.000 m2	Jalan DR. Mr. T. Muhammad Hasan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar	28.770.868.000
Jumlah			28.770.868.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah diatas berasal dari taksiran nilai hibah tanah dari Pemerintah Aceh sebesar Rp21.250.000.000 dan Belanja Modal Tanah sebesar Rp10.880.000 yang terdiri dari biaya pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp4.250.000 dan transport lokal sebesar Rp6.630.000 dan Revaluasi sebesar Rp7.509.988.000.

Tanah seluas 25.000 m2 yang terletak di Jalan DR. Mr. T. Muhammad Hasan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal neraca telah selesai dibangun sarana dan prasarana gedung perkantoran Pusjar SKMK.

Peralatan dan Mesin

Rp21.979.894.578

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan tahun 2024 adalah Rp21.979.894.578 dan Rp20.096.157.595.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.7
Rincian Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	20.096.157.595
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.989.946.983
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	
Penghentian penggunaan BMN	(106.210.000)
Saldo per 31 Desember 2025	21.979.894.578
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(18.980.472.121)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.999.422.457

Untuk mutasi tambah karena adanya pengadaan AC ½ PK, Speaker Aktif, alat fitness, alat kesehatan, Bed klinik dan mesin EKG, Braket TV standing, mesin potong rumput dan gergaji mesin, dan pengadaan laptop dan ups. Sedangkan untuk mutasi kurang karena adanya penghentian pemakaian BMN berupa alat absensi beserta software yang merupakan rekomendasi dari pemeriksaan BPK RI.

Gedung dan Bangunan
Rp70.141.182.250

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan tahun 2024 adalah Rp70.141.182.250 dan Rp68.738.003.111. Mutasi transaksi Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.8
Rincian Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	68.738.003.111
Mutasi tambah:	1.414.379.139
Mutasi Kurang:	(11.200.000)
Saldo per 31 Desember 2025	70.141.182.250
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(11.060.000.590)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	59.081.181.660

Untuk mutasi tambah per 31 Desember 2025 di Pusjar SKMK dikarena adanya pekerjaan pembangunan/rehab/renovasi Gedung dan Bangunan berupa belanja modal berupa pekerjaan pembuatan kanopi parkir sebesar Rp78.071.029, belanja penambahan nilai Gedung dan Bangunan berupa Rehabilitasi/renovasi Gedung bangunan (penggantian atap, dan pengecatan Gedung A, B, dan D) sebesar Rp465.159.338, pekerjaan pembuatan kanopi di Gedung B sebesar Rp121.424.838, renovasi ruangan auditorium sebesar

Rp176.234.286, renovasi Gedung dan bangunan sebesar Rp130.403.338, renovasi dan interior sebesar Rp185.191.475, dan renovasi ruang pertemuan sebesar Rp161.330.885 serta pembayaran jasa perencanaan sebesar Rp48.573.000, jasa pengawasan sebesar Rp36.790.950 dan pengelola kegiatan sebesar Rp11.200.000. Pada tahun 2025 terdapat koreksi pencatatan terhadap Gedung dan Bangunan dikarenakan oleh pekerjaan fisik renovasi 5 Gedung didalam satu kontrak kerja sehingga perlu di sesuaikan nilai aset per gedungnya secara proporsional yang berdampak pada pengurangan dan pertambahan nilai di masing-masing gedung yg direnovasi, masing-masing Gedung dan Bangunan tersebut adalah Gedung Bangunan Kantor permanen 1, Gedung Bangunan Pendidikan Permanen 1, Asrama Permanen 1, Asrama Permanen 2, dan Gedung Bangunan Pertemuan Permanen 1. Sedangkan untuk mutasi kurang adalah karena adanya koreksi non revaluasi berupa konsumsi paket pengadaan (pengelola kegiatan) sebesar Rp11.200.000 yang merupakan hasil rekomendasi dari pemeriksaan BPK RI

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp602.018.668

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp602.018.668 dan Rp602.018.668.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.9
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	602.018.668
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
Saldo Per 31 Desember 2025	602.018.668
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	814.988
Nilai Buku per 31 Desember 2025	602.833.656

Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan. Rincian edun tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp40.981.000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024 adalah Rp40.981.000 dan Rp40.981.000 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.10
Rincian Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	40.981.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	40.981.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	40.981.000

Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap saldo Aset Tetap Lainnya. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp31.590.209.958)*

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 dan tahun 2024 adalah masing - masing sebesar Rp31.696.563.548 dan Rp29.397.363.121. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel C.11
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	28.770.868.000	-	28.770.868.000
2	Peralatan dan Mesin	22.086.104.578	19.419.141.654	2.666.962.924
3	Gedung dan Bangunan	68.816.074.140	11.796.285.757	57.019.788.383
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	602.018.668	479.136.137	122.882.531
5	Aset Tetap Lainnya	40.981.000	-	40.981.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.336.308.110	-	1.336.308.110
Akumulasi Penyusutan		121.652.154.494	31.696.563.548	89.955.790.946

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.12
Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2025 dan 2024

Jenis Penyusutan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 2025	Akumulasi Penyusutan 2024
Akumulasi Penyusutan Tanah	-	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	19.419.141.654	18.585.240.993
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.798.285.757	10.339.628.289
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	479.136.137	472.493.839
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan	31.696.563.548	29.397.363.121

Aset Lainnya Rp0

C.3. ASET LAINNYA

Jumlah Aset Lainnya Tahun 2025 dan tahun 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Pusjar SKMK terdiri dari Aset Tak Berwujud (ATB).

Aset Tak Berwujud Rp0

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) Tahun 2025 dan tahun 2024 adalah Rp0 dan Rp20.000.000. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. ATB pada Pusjar SKMK berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi ATB pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.13
Rincian Aset Tak Berwujud

Saldo per 31 Desember 2024	20.000.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	(20.000.000)
Saldo per 31 Desember 2025	-
Amortisasi	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Adanya mutasi kurang atas ATB merupakan hasil rekomendasi dari pemeriksaan BPK RI, agar ATB dimaksud untuk segera dihentikan penggunaannya dan dihapus dari daftar BMN.

Aset Lain-lain
Rp126.210.000

C.3.2. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Lain-lain Tahun 2025 dan tahun 2024 adalah Rp126.210.000 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan aset yang dihentikan penggunaannya lalu direklasifikasi menjadi aset lain-lain sebelum dihapuskan dari neraca.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya (Rp126.210.000)

C.3.2. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025 dan tahun 2024 adalah masing-masing Rp126.210.000 dan Rp20.000.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel C.14
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	126.210.000	(126.210.000)	-
Jumlah	126.210.000	(126.210.000)	-

Kewajiban Jangka Pendek
Rp31.451.809

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Pusjar SKMK Tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp31.451.809 dan Rp73.343.848.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp28.949.726

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga periode Tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing Rp28.949.726 dan Rp66.294.448. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan diselesaikan kepada pihak ketiga dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel C.15
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2025	2024
Tagihan Listrik	26.225.041	63.310.189
Tagihan Telepon	1.997.061	2.120.057
Tagihan PDAM	37.500	37.500
Belanja Pegawai yang harus dibayarkan	690.104	826.702
Belanja Modal yang harus dibayarkan	-	-
	28.949.726	66.294.448

Rincian utang kepada pihak lainnya untuk Tahun 2025 adalah Belanja Barang yang masih harus dibayarkan.

Tabel C.16
Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayarkan

No	KETERANGAN	TANGGAL	SP2D / NTPN	JUMLAH
1	Tagihan Listrik Desember 2025	23-01-2026	260010000001713	26.225.041
2	Tagihan Telepon Desember 2025	23-01-2026	260010000001713	1.997.081
3	Tagihan PDAM Desember 2025	23-01-2026	260010000001713	37.500
4	Belanja Gaji Pokok PNS	06-02-2026	260010000003386	634.700
5	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	06-02-2026	260010000003386	40.850
6	Belanja Tunjangan Anak PNS	06-02-2026	260010000003386	14.474
7	Belanja Pembulatan Gaji PNS	06-02-2026	260010000003386	80
JUMLAH				28.949.726

Pendapatan Diterima di Muka Rp2.502.083.

C.4.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.502.083 dan Rp7.049.400. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNPB yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang / jasa. Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2025 sebesar Rp2.502.083 merupakan pendapatan atas pembayaran sewa lahan kantin periode Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dengan masa sewa Mei 2023 sampai dengan Mei 2026.

Ekuitas Rp90.153.224.191

C.5. Ekuitas

Ekuitas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp90.153.224.191 dan Rp89.015.262.603. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp6.835.067.317

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp6.835.067.317 dan Rp5.533.591.600. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel D.1
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4.547.317	5.961.600	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	211.725.000	278.730.000	(24,04)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	6.578.790.000	5.248.620.000	25,34
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	40.000.000	-	-
Pendapatan Denda Lainnya	-	280.000	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	5.000	49.600	-
Jumlah	6.835.067.317	5.533.641.200	23,52

Realisasi Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Pendapatan yang baru diakui dari pembayaran sewa kantin sebesar Rp4.547.317, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp211.725.000 berupa sewa auditorium, sewa mini teater, sewa proyektor, sewa kamar standar dan kamar vip, sewa ruang kelas dan sewa rumah susun. Pendapatan Pendidikan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp6.578.790.000 dengan rincian Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II satu angkatan, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dua angkatan, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas satu angkatan, Latsar CPNS sebanyak tiga belas angkatan, dan Pendapatan Pengembangan SDM lainnya berupa Uji Kompetensi Analisis Kebijakan besar Rp40.000.000, dan pendapatan anggaran lain-lain berupa kelebihan pembayaran biaya pelatihan nasional Tk.II dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebesar Rp5.000.

Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak pada LRA sebesar Rp6.845.362.176 dan pendapatan LO sebesar Rp6.833.816.275, bila dibandingkan dengan LO terdapat selisih sebesar Rp10.294.859. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya jurnal balik Pendapatan Diterima di Muka pada awal tahun 2025, yang menyebabkan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan) Tahun 2025 bertambah Rp7.049.400;
2. Adanya jurnal penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka pada akhir tahun 2025 yang menyebabkan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan) Tahun 2025 berkurang Rp2.502.083;
3. Adanya pendapatan dari penerimaan kembali belanja pegawai TAYL dan Belanja Barang TAYL dicatat di LRA sebagai Pendapatan sehingga Pendapatan bertambah sebesar Rp14.842.176.

Beban Pegawai
Rp9.735.136.658

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.735.136.658 dan Rp8.378.433.505. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan pembentukan modal. Pada Tahun 2025 Pusjar SKMK telah melakukan pembayaran tunjangan kinerja untuk setiap pegawai (PNS dan PPPK) terkait perubahan pembayaran tunjangan kinerja dan gaji untuk pengangkatan 3 orang PPPK Tahun Anggaran 2025, dan pengangkatan 3 orang CPNS.

Tabel D.2
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok	2.946.401.140	2.922.728.900	0,81
Pembulatan Beban Gaji	43.241	44.167	(2,10)
Pengembalian Pembulatan Beban Gaji	(337)	(2.441)	-
Beban Tunj. Suami/Istri	235.999.186	238.235.650	(0,94)
Beban Tunj. Anak	66.928.566	66.064.820	1,31
Beban Tunj. Struktural	63.140.000	63.140.000	-
Beban Tunj. Fungsional	445.792.000	418.586.000	6,50
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional/Struktural	-	(2.780.000)	-
Beban Tunj. PPh	33.313.655	32.720.562	1,81
Beban Tunj. Beras	172.576.860	172.866.540	(0,17)
Beban Tunj. Umum	46.480.000	51.455.000	(9,67)
Pengembalian Beban Tunj. Umum	(740.000)	(1.295.000)	-
Beban Uang Makan	485.064.000	474.234.000	2,28
Beban Uang Lembur	-	11.379.000	-
Beban Gaji Pokok PPPK	113.916.649	38.443.200	-
Pembulatan Beban Gaji PPPK	2.196	716	-
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	4.604.416	-	-
Beban Tunj. Anak PPPK	1.381.324	-	-
Beban Tunj. Fungsional PPPK	7.560.000	6.480.000	-
Beban Tunj. Beras PPPK	6.324.680	869.040	-
Beban Uang Makan PPPK	26.681.000	7.326.000	-
Beban Tunj. Umum PPPK	4.950.000	-	-
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kinerja)	4.927.451.487	3.827.327.737	-
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kinerja)	(3.424.212)	(433.633)	-
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kinerja) PPPK	150.690.807	51.043.447	-
Jumlah	9.735.136.658	8.378.433.505	16,19

Nilai Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp9.738.234.203 dan LO sebesar Rp9.735.136.658, bila dibandingkan dengan LO terdapat selisih sebesar Rp3.097.545. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya jurnal penyesuaian untuk pengembalian uang makan desember di akhir periode tahun 2025;
2. Adanya jurnal penyesuaian untuk pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan desember 2025 untuk pns dan pppk;
3. Adanya jurnal penyesuaian terkait belanja pegawai yang masih harus dibayarkan berupa gaji pokok pns, tunjangan suami/istri pns, tunjangan anak pns, dan pembulatan gaji pns.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp209.204.332 dan Rp111.274.388 dan. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.3
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	209.204.332	111.274.388	88,01
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Jumlah	209.204.332	111.274.388	88,01

Nilai

Belanja Persediaan pada LRA sebesar Rp29.885.000, dibandingkan dengan LO terdapat selisih sebesar Rp179.319.332. Hal ini disebabkan untuk Belanja Persediaan pada LRA dicatat berbasis kas, yang dicatat merupakan nilai pembelian yang menambah persediaan. Sedangkan LO nilai Beban Persediaan berasal dari pemakaian persediaan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.073.505.551 dan 6.305.144.773.

Untuk periode 31 Desember 2025 terjadi penurunan realisasi dikarenakan adanya optimalisasi penggunaan terkait dengan instruksi presiden tentang efisiensi anggaran.

Nilai Belanja Barang dan Jasa pada LRA sebesar Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.4
Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik Turun %
- Beban Keperluan Perkantoran	2.137.385.303	2.190.581.413	(2,43)
- Beban Pengiriman Surat Dinas	16.106.000	3.727.400	332,10
- Beban Honor Oprs. Satker	113.400.000	75.132.800	50,93
- Beban Bahan	1.315.948.000	1.413.574.600	(6,91)
- Beban Honor Output Kegiatan	1.225.384.000	937.950.000	30,64
- Beban Brg Non Oprs. Lainnya	273.880.973	533.298.250	500,00
- Beban Aset Ekstrakomp PM	149.675.000	93.924.000	59,36
- Beban Langganan Listrik	445.482.477	694.632.266	(35,67)
- Beban Langganan Telepon	24.852.895	26.117.298	(4,84)
- Beban Langganan Air	1.374.800	450.000	205,51
- Beban Sewa	181.215.103	179.546.746	0,93
- Beban Jasa Profesi	179.800.000	152.610.000	17,82
- Beban Jasa Lainnya	9.000.000	3.600.000	-
Jumlah	6.073.505.551	6.305.144.773	(3,67)

Nilai Belanja Barang dan Jasa pada LRA sebesar Rp6.103.591.017, dibandingkan dengan LO terdapat selisih sebesar Rp30.085.466. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya jurnal balik Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar pada akhir tahun 2024 berupa tagihan listrik bulan desember 2024 sebesar Rp63.310.189, tagihan telpon bulan desember 2024 sebesar Rp2.120.057, dan tagihan Air (PDAM) bulan desember 2025 sebesar Rp37.500, yang menyebabkan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 bertambah senilai Rp65.467.746;
2. Adanya jurnal penyesuaian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar pada akhir tahun 2025 berupa tagihan listrik bulan desember 2025 sebesar Rp26.225.041, tagihan telpon bulan desember 2025 sebesar Rp1.997.081, dan tagihan Air (PDAM) bulan desember 2025 sebesar Rp37.500, yang menyebabkan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 berkurang senilai Rp28.259.622.
3. Adanya jurnal penyesuaian Belanja Bahan berupa koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp11.200.000 merupakan rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI.
4. Adanya jurnal penyesuaian terkait beban sewa atas langganan canva dan capcut sebesar Rp4.848.250.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp818.914.914 dan Rp584.640.763. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan Tahun 2025 karena dilakukan pemeliharaan kendaraan roda dua dan roda empat dan Pemeliharaan halaman kantor, sedangkan per 31 Desember 2024 dilakukan pemeliharaan lift, pompa mesin pemadam kebakaran, genset 500 KV dan pemeliharaan AC sentral. Rincian beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.5
Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik / Turun (%)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	382.391.975	312.850.113	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	398.135.839	29.414.650	1.253,53
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.387.100	242.376.000	
Jumlah	818.914.914	584.640.763	40,07

Nilai Belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp1.001.340.314, dibandingkan dengan LO terdapat selisih sebesar Rp182.425.400. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Untuk Belanja Persediaan pada LRA dicatat berbasis kas, yang dicatat merupakan nilai pembelian yang menambah persediaan. Sedangkan di LO nilai Beban Persediaan berasal dari pemakaian persediaan.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp411.652.526 dan Rp1.706.959.787. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.6
Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	389.857.866	1.485.841.562	(73,76)
Pengembalian beban perjalanan dinas biasa	(1.901.000)	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23.815.660	-	-
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(120.000)	-	-
Beban Perjalanan Biasa - luar negeri	-	221.118.225	-
Jumlah	411.652.526	1.706.959.787	(75,88)

penurunan beban perjalanan dinas disebabkan intruksi presiden terkait efisiensi anggaran, sehingga kegiatan yang tidak mendesak dan bisa dihadiri secara daring tidak perlu melakukan perjalanan dinas. Nilai Belanja Perjalanan Dinas pada LRA sebesar Rp411.652.526, atas hal ini maka tidak terdapat selisih antara LRA dan LO.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2.299.200.427

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.299.200.427 dan Rp2.343.728.564. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.7
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	833.900.661	896.341.664	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.458.657.468	1.440.744.602	-
Beban Penyusutan Jaringan	6.642.298	6.642.298	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Jumlah Penyusutan	2.299.200.427	2.343.728.564	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	2.343.728.564	-
Jumlah	2.299.200.427	2.343.728.564	-

Untuk Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan jurnal atas transaksi penyusutan aset tetap sehingga tidak ada nilai LRA nya.

Beban Penyisihan Piutang
Tak Tertagih (Rp59.405)

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar minus Rp59.405 dan Rp74.210 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.8
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(59.405)	74.210	-
Jumlah	(59.405)	74.210	-

Untuk Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan jurnal penyesuaian karena adanya pencatatan piutang jangka pendek, sehingga tidak ada nilai LRA nya.

Pos Luar Biasa Rp0

D.9. Pos Luar Biasa

Pos luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada diluar kendali entitas. Tidak ada pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024.

	E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp89.015.262.603</i>	E.1. Ekuitas Awal Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp89.015.262.603 dan Rp90.801.921.624.
<i>Defisit LO</i> <i>(Rp12.731.952.696)</i>	E.2. Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar minus Rp12.731.952.696 dan minus Rp13.841.733.204. Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
<i>Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0</i>	E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Rp0.
<i>Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp20.914.000</i>	E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp20.914.600 dan minus Rp9.453.264. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap non revaluasi berupa penyesuaian aset rusak yang akan dilakukan penghapusan berupa aset peralatan dan mesin sebesar Rp20.914.000.
<i>Koreksi Lain-lain Rp5.332.678</i>	E.3.3. Koreksi Lain-lain Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.332.678 dan Rp. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait dengan Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas Pendapatan, koreksi atas Beban, koreksi atas Hibah, koreksi atas Piutang dan koreksi atas Hutang. Koreksi tersebut berupa pencatatan pertama kali untuk beban sewa berupa langganan keanggotaan DOI (Digital Object Identifier).

Transaksi Antar Entitas
Rp13.843.667.006

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.843.667.006 dan Rp12.064.527.447. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian transaksi Antar Entitas terdiri dari ;

Tabel E.1
Rincian Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2025

Uraian Transaksi Antar Entitas	Jumlah
Ditagihkan ke Entitas Lain	20.689.029.182
Diterima dari Entitas Lain	(6.845.362.176)
Transfer Masuk	-
Jumlah	13.843.667.006

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) / Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain / Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp20.689.029.182 dan DDEL sebesar Rp6.845.362.176.

Ekuitas Akhir
Rp90.153.224.191

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing - masing sebesar Rp90.153.224.191 dan Rp89.015.262.603.

F. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1. Tindak Lanjut Temuan BPK RI

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan temuan pemeriksaan Inspektorat LAN RI atas Laporan Keuangan Tahun 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Terdapat kelebihan pembayaran uang lembur, honorarium widyaiswara, honorarium penceramah, honorarium staf pengelola keuangan dan pembayaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri.

Tindak Lanjut:

Sudah dilakukan pengembalian dan sudah dicatat di Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited).

- Pertanggungjawaban tidak akuntabel dan bukti tidak lengkap

Tindak Lanjut:

Sudah dilengkapi dan disesuaikan berdasarkan rekomendasi dari auditor Inspektorat LAN RI, dan sudah dikirimkan form perbaikan ke Inspektorat.

F.2. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) Pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan.

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun 2025 pada Pusjar SKMK antara lain sebagai berikut:

INFORMASI KINERJA PUSJAR SKMK TAHUN 2025

Kementerian / Lembaga : (086) Lembaga Administrasi Negara

Fungsi : (01) Pelayanan Umum

Sub Fungsi : (01.01) Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Ket.
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
01	Program CD	5.591.063.000	493.121.436	8,82					
	Kegiatan 4825	2.000.000	2.000.000	100					
	RO BMA.003	2.000.000	2.000.000	100	2	2	Publikasi	100	

Kegiatan 7914	52.219.000	52.219.000	100			Rekomendasi	
RO ABQ.007	37.219.000	37.219.000	100	1	1	Kebijakan	100
RO BMA.004	15.000.000	15.000.000	100	2	2	Dokumen	100
Kegiatan 7913	34.000.000	29.283.148	86,12				
RO ADI.001	34.000.000	29.283.148	86,12	25	25	Orang	100
Kegiatan 7916	3.324.683.000	2.992.499.782	89,67				
RO FAC.001	1.501.008.000	1.191.760.118	79,39	194	194	Orang	100
RO FAC.002	1.748.185.000	1.732.393.921	99,09	548	548	Orang	100
RO FAC.004	75.490.000	68.345.743	90,53	145	120	Orang	100
Program WA	14.900.407.000	9.394.061.210	63,05				
Kegiatan 4822	5.979.543.000	5.979.408.269	100				
RO EBA.994	5.979.543.000	5.979.408.269	100	2	2	Layanan	100
Kegiatan 4823	454.000	453.998	100				
RO EBA.958	454.000	453.998	100	1	1	Layanan	100
Kegiatan 7918	9.772.553.000	9.760.811.661	99,87				
RO CCL.001	17.400.000	17.400.000	100	1	1	Unit	100
RO CAN.001	1.100.766.000	1.100.196.012	99,94	7	7	Unit	100
RO EBA.958	22.146.000	22.127.000	99,91	1	1	Layanan	100
RO EBA.959	83.000.000	82.856.000	99,82	1	1	Layanan	100
RO EBA.962	256.821.000	256.532.330	99,88	2	2	Layanan	100
RO EBA.994	5.979.543.000	5.977.570.209	99,96	2	2	Layanan	100
RO EBB.951	889.901.000	889.750.971	99,98	15	15	Unit	100
RO EBB.971	1.422.976.000	1.414.379.139	99,39	1	1	Unit	100
Kegiatan 7919	186.646.000	186.431.000	99,88				
RO EBC.954	186.646.000	186.431.000	99,88	63	63	Orang	100

Sampai dengan Tahun 2025, Pusjar SKMK telah melaksanakan semua kegiatan yang mendukung capaian output sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam DIPA Tahun 2025.

Realisasi kinerja Pusjar SKMK menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa penyesuaian jadwal akibat proses administrasi perubahan kode akun standar terkait perubahan nomenklatur LAN dan pembukaan blokir anggaran. Secara umum, capaian output kegiatan Pusjar SKMK pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara

Kegiatan kajian kebijakan di bidang strategi kebijakan manajemen kinerja telah mencapai tahap penyusunan laporan dan finalisasi data lapangan, sedangkan untuk penyusunan Jurnal Transformasi Administrasi Tahun 2025 telah diterbitkan dua edisi pada semester I dan semester II Tahun 2025. Dengan realisasi fisik 100 persen.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara

Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara, yang meliputi Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) 1 Angkatan, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 2 Angkatan, dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 1 Angkatan, dan Pelatihan Khusus Analis

Kebijakan selama periode Tahun 2025 sudah selesai dilaksanakan dengan pertanggungjawaban fisik 100 persen dan realisasi anggaran sudah mencapai 89,67 persen. Hal ini diakibatkan masih adanya pagu anggaran yang diblokir berupa perjalanan di masing masing kegiatan, sehingga secara angka pagu tersebut tidak bisa digunakan.

3. Untuk semua RO yang berasal dari program Dukungan Manajemen sudah selesai pelaksanaan dan pertanggungjawabannya, realisasi fisik sebesar 100 persen, dan realisasi keuangan rata rata 99,99 persen.

F.3. Penyajian Data Program Prioritas Nasional pada Lampiran Laporan Keuangan
Pada Tahun Anggaran 2025, Pusjar SKMK tidak melaksanakan kegiatan yang secara langsung termasuk dalam Program Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 merupakan bagian dari program dan kegiatan reguler yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusjar SKMK, khususnya dalam bidang pengembangan kompetensi aparatur, rekomendasi kebijakan di bidang strategi kebijakan manajemen kinerja, serta penguatan tata kelola kelembagaan dan layanan internal.

Meskipun tidak terdapat kegiatan yang dikategorikan sebagai program prioritas nasional, pelaksanaan kegiatan Pusjar SKMK tetap berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis LAN, yaitu peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan, rekomendasi kebijakan, serta pengembangan inovasi administrasi publik.

F.4. Pengungkapan lain-lain

F.4.1. Rekening Pemerintah

Rekening-rekening yang digunakan/dipertahankan dalam pengelolaan keuangan adalah rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan berdasarkan ijin dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh.

1. Rekening Bendahara Pengeluaran:

No. Rekening : 810-016-680612-1-000

Atas Nama : BPG 001 Puslatbang KHAN

Nama Bank : PT. Bank Syariah Indonesia Cab. Banda Aceh

2. Rekening Bendahara Penerimaan:

No. Rekening : 755-00-75754

Atas Nama : BPN 001 Puslatbang KHAN

Nama Bank : PT. Bank Syariah Indonesia Cab. Banda Aceh

F.2.2. Hibah Tanah dari Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh menghibahkan barang milik daerah berupa sebidang tanah seluas 25.000 M² yang terletak di Jalan Dr. Mr. T. H. Muhammad Hasan Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar untuk Pembangunan Gedung PKP2A IV LAN di Aceh sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Nomor 24/BA/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dengan nilai taksiran sebesar Rp21.250.000.000. Hibah barang berupa tanah dari Pemerintah Aceh tersebut, telah dilakukan pembuatan sertifikat hak pakai atas tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Aceh Besar dengan Akta Nomor 5 tanggal 27 Maret 2012.

Hibah barang berupa tanah ini telah didaftarkan secara kolektif oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia ke Direktorat Jenderal Pengelola Utang c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Kementerian Keuangan untuk mendapatkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang dengan Surat Nomor 1440/XI/14/6/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan telah di terbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang oleh Direktorat Jenderal Pengelola Utang c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Kementerian Keuangan dengan Nomor 604/S.1/BMN.03.2 tanggal 22 Maret 2012 dengan Nomor Register Pendapatan Hibah 72206401 serta telah disahkan dengan Nomor SP3HLBJS-0110/PU.6/2011 tanggal 30 Desember 2021 serta telah dilaporkan ke KPPN Banda Aceh dan telah di keluarkan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dengan Nomor 811210W/001/701 tanggal 31 Desember 2011.

Hibah Tanah dari Pemerintah Aceh ini, telah selesai dibangun Gedung Kantor Pusjar SKMK berupa Gedung Administrasi, Gedung Asrama, Gedung Diklat, Auditorium, Sarana Ibadah dan lain-lain. Gedung kantor dan fasilitas lainnya ini telah diresmikan penggunaannya oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Gubernur Aceh pada tanggal 24 April 2015.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KPPN BANDA ACEH

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 680612 - PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN
KINERJA
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 3:15
Kode Lap : shr_kppn_pot

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,178,068,000	21,178,068,000	0
2	Belanja	20,695,214,731	20,695,214,731	0
3	Pengembalian Belanja	-6,185,549	-6,185,549	0
4	Estimasi Pendapatan	6,823,030,000	6,823,030,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	6,845,362,176	6,845,362,176	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (880612) PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN
MANAJEMEN KINERJA

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:10 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	9,410,020	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	2,960,947	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	14,805
0.0	117111	Barang Konsumsi	175,288,200	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	52,297,100	0
0.0	131111	Tanah	28,770,868,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	21,979,894,578	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	70,141,182,250	0
0.0	134113	Jaringan	602,018,668	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	40,981,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	19,312,931,654
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	11,798,142,167
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	479,136,137
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	106,210,000	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	20,000,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	106,210,000
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	20,000,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	690,104
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	28,260,622
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	2,502,083
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	20,689,029,182
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	6,845,362,176	0
0.0	391111	Ekuitas	0	89,015,262,603
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non-Royalti	0	20,814,600
0.0	391118	Koreksi Lainnya	0	5,332,678
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,547,317
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	211,725,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	6,578,790,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	40,000,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	5,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,316,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,946,401,140	0
3.0	511118	Beban Pembulatan Gaji PNS	42,904	0
3.0	511121	Beban Tunj. Sewa/tena PNS	235,999,100	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	66,928,588	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	63,140,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	445,792,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA : (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (680512) - PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN
MANAJEMEN KINERJA

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:10 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_aktual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	33,313,855	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	172,576,850	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	485,084,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umrah PNS	45,740,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	113,916,549	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,196	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Sewa/Rent PPPK	4,604,416	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,381,324	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Risiko PPPK	6,324,680	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	26,681,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	4,950,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,924,027,275	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	150,690,807	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,137,386,303	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,106,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	113,400,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,315,948,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,225,384,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	273,680,973	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	149,675,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	445,482,477	0
3.0	522112	Beban Langganan Telekom	24,852,895	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,374,800	0
3.0	522141	Beban Sewa	181,215,103	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	179,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	9,000,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	382,391,975	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	348,135,839	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	387,956,866	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23,695,660	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	833,900,651	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,458,513,878	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	8,642,298	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	209,204,332	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	38,387,100	0
3.0	593311	Beban Penyusutan Nilai Persediaan	10,000	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	59,406

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (006) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (000012) PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN
MANAJEMEN KINERJA

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:10 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satkor_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	20,914,600	0
Jumlah:			148,314,868,357	148,314,868,357

Keterangan :

FINAL

Aceh Besar, 6 Mei 2026



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (000) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0000) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (680612) - PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KERJA MANAJEMEN KINERJA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:10 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITACAIKAN KE ENTITAS LAIN	0	20,689,029,182
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	6,845,362,175	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	211,725,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	6,578,790,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	40,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,262,970
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,578,200
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	5,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,945,788,440	0
3.0	511119	Belanja Pembuktian Gaji PNS	43,161	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	235,958,336	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	66,914,092	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	63,140,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	448,072,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	33,313,655	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	172,576,860	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	485,428,000	0
3.0	511131	Belanja Tunjangan Umum PNS	48,330,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	113,916,649	0
3.0	511619	Belanja Pembuktian Gaji PPPK	2,196	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,604,416	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,381,324	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6,324,880	0
3.0	511626	Belanja Uang Makan PPPK	26,681,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	4,950,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,928,701,257	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	190,734,686	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkamoran	2,137,386,303	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,106,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	113,400,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,304,748,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,225,384,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	273,880,973	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	149,675,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	29,685,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	482,567,625	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (006) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (680612) PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN
MANAJEMEN KINERJA

Tgl Data : 08/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:10 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	24,975,871	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,374,800	0
3.0	522141	Belanja Sewa	185,292,445	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	179,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	9,000,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	362,391,975	0
3.0	523112	Belanja Borang Penediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100,692,500	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	398,135,839	0
3.0	523123	Belanja Borang Penediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120,120,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	389,857,866	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23,815,660	0
3.0	532111	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	1,989,946,983	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78,071,029	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,336,308,110	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	337
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	3,424,212
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,901,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	120,000
JUMLAH			27,540,576,907	27,540,576,907

Keterangan :

FINAL



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 086
ESELON I : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 01
SATUAN KERJA : PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA 680612

Tgl Data : 08/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 8:10 PM
Halaman : 1
lap_jra_face_saker_new.doc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
I	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.823.030.000	6.845.362.176	22.332.176	100	5.520.775.000	5.541.502.000	(26.727.000)	100
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6.823.030.000	6.845.362.176	22.332.176	100	5.520.775.000	5.541.502.000	(20.727.000)	100
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	6.823.030.000	6.845.362.176	22.332.176	100	5.520.775.000	5.541.502.000	(20.727.000)	100
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	21.178.088.000	20.689.029.182	(489.058.818)	98	17.758.404.000	17.606.029.447	152.374.553	99
1. Belanja Pegawai	9.574.076.000	9.735.234.203	(161.158.203)	99	8.424.791.000	8.379.869.779	44.921.221	99
2. Belanja Barang	7.590.369.000	7.545.468.657	(44.900.343)	96	8.879.738.000	8.772.525.568	107.212.432	99
3. Belanja Modal	3.413.643.000	3.404.326.122	(9.316.878)	100	453.877.000	453.534.000	343.000	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 086
ESELON I : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 01
SATUAN KERJA : PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA 680012



Tgl Data : 05/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:10 PM
Halaman : 2
lap_jra_jepa_siber_new.doc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fask	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fask	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Ketersediaan Daerah Istisnawi Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	21.179.088.000	20.699.029.182	(489.058.818)	98	17.758.404.000	17.606.029.447	152.374.553	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Aceh Besar, 6 Mei 2026



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 086
: 01
: 0600
: 000612

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 09-05-26 3:11 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_jra_per_akun_saklar

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENDEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425151	Pendapatan Pengurusan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	208.240.000	211.725.000	0	211.725.000	101,67
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	208.240.000	211.725.000	0	211.725.000	101,67
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	6.614.790.000	6.578.790.000	0	6.578.790.000	99,46
425428	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	40.000.000	0	40.000.000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	6.614.790.000	6.618.790.000	0	6.618.790.000	100,00
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2.262.976	0	2.262.976	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12.579.200	0	12.579.200	0
425996	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	5.000	0	5.000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	14.842.176	0	14.842.176	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	6.823.030.000	6.845.362.176	0	6.845.362.176	100,33
	JUMLAH PENDAPATAN	6.823.030.000	6.845.362.176	0	6.845.362.176	100,33

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 3:11 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_fm_bel_akun_sadker_joc
Tgl Data : 5/26 3:13 PM

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 988
ESOLON I : 91
WILAYAH/PROVINSI : 0600
SATUAN KERJA : 600612
JENIS SATUAN KERJA : KD

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA		% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	REKONSILIASI BELANJA		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8=4.7
51	BELANJA PEGAWAI						
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.990.000.000	2.954.425.000	2.945.766.440	0	98,51	8.558.560
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	42.000	47.000	43.161	337	91,11	4.176
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	210.000.000	237.171.000	235.958.336	0	98,49	1.212.664
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	63.000.000	67.362.000	66.914.092	0	99,34	447.908
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	83.140.000	83.140.000	83.140.000	0	100	0
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	392.000.000	447.212.000	446.072.000	0	99,75	1.140.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	26.000.000	33.432.000	33.313.655	0	99,65	118.345
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	140.000.000	172.578.000	172.578.850	0	100	2.140
511126	Belanja Tunj. Bonus PNS	396.440.000	492.319.000	485.428.000	0	98,8	6.891.000
511129	Belanja Uang Makan PNS	31.590.000	49.825.000	48.330.000	740.000	95,9	2.035.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	4.002.242.000	4.517.312.000	4.497.542.544	740.337	96,35	20.506.793
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111							
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	44.856.000	113.919.000	113.910.049	0	100	2.351
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	14.000	6.006	2.196	0	36,6	3.804
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14.000	4.605.000	4.604.416	0	99,99	584
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	14.000	1.383.000	1.381.324	0	99,88	1.676
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	7.580.000	7.580.000	7.560.000	0	100	0
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.022.000	6.327.000	6.324.880	0	99,96	2.320
511625	Belanja Tunjangan Basis PPPK	9.213.000	28.217.000	26.881.000	0	94,58	1.538.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	4.950.000	4.950.000	0	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	62.693.000	168.987.000	165.420.265	0	99,07	1.846.735
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116							
5122	Belanja Lembur	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000
512211	Belanja Uang Lembur	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122							
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transit	4.421.242.000	5.026.895.000	4.926.701.257	3.424.212	97,98	101.577.955
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	64.650.000	154.942.000	150.734.686	0	97,26	4.207.314
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	4.456.592.000	5.191.797.000	5.079.435.943	3.424.212	97,96	105.760.269
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124							
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51							
52	BELANJA BARANG						
5211	Belanja Barang Operasional						

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/26 3:11 PM
Halaman : 2
Prg ID : R0_Pg_bel_akun_saker_p00
Tgl Data : 6/5/26 2:13 PM

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006
ESOLON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0600
SATUAN KERJA : 600612
JENIS SATUAN KERJA : KD

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGENBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521111	Belanja Operasional Pemeliharaan	2.234.100.000	2.138.632.000	2.137.386.303	0	2.137.386.303	95,64	1.045.697
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pustak	10.100.000	19.300.000	16.106.000	0	16.106.000	83,45	3.194.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	77.200.000	113.400.000	113.400.000	0	113.400.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2.311.548.000	2.271.332.000	2.268.892.303	0	2.268.892.303	99,8	4.439.697
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1.440.683.000	1.305.207.000	1.304.748.000	0	1.304.748.000	90,58	459.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.433.700.000	1.239.000.000	1.228.384.000	0	1.228.384.000	98,9	13.616.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	457.258.000	274.284.000	273.880.973	0	273.880.973	95,86	383.027
521252	Belanja Perawatan dan Mesin - Ekstrakompletel	0	149.875.000	149.875.000	0	149.875.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3.331.641.000	2.968.146.000	2.953.687.973	0	2.953.687.973	95,51	14.458.027
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	50.036.000	29.886.000	29.886.000	0	29.886.000	100	1.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	60.036.000	29.886.000	29.886.000	0	29.886.000	100	1.000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	790.000.000	482.789.000	482.567.625	0	482.567.625	96,95	221.375
522112	Belanja Langganan Telepon	26.840.000	25.110.000	24.975.871	0	24.975.871	95,47	134.129
522113	Belanja Langganan Air	600.000	1.416.000	1.374.800	0	1.374.800	97,09	41.200
522141	Belanja Sewa	185.560.000	188.088.000	185.282.445	0	185.282.445	99,37	750.555
522151	Belanja Jasa Profesi	317.900.000	188.300.000	179.800.000	0	179.800.000	96,48	8.800.000
522191	Belanja Jasa Lainnya	3.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1.313.700.000	992.703.000	983.010.741	0	983.010.741	98,91	9.882.258
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199.465.000	382.966.000	382.391.975	0	382.391.975	98,85	576.025
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	65.000.000	100.700.000	100.692.500	0	100.692.500	98,88	7.500
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	245.115.000	300.680.000	398.135.839	0	398.135.839	99,61	1.544.161
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000	120.130.000	120.120.000	0	120.120.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	524.580.000	1.003.466.000	1.001.340.314	0	1.001.340.314	99,79	2.127.686
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.472.260.000	599.840.000	389.857.866	1.801.000	387.956.866	55,44	311.883.134
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.500.000	850.000	0	0	0	0	850.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	24.144.000	23.815.660	120.000	23.695.660	98,14	448.340
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1.480.760.000	724.834.000	413.673.526	2.021.000	411.652.526	56,79	313.181.474
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	9.012.234.000	7.890.366.000	7.848.489.557	2.021.000	7.846.468.557	95,64	343.900.143
53	BELANJA MODAL							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 3:11 PM
Halaman : 3
Prj ID : lap_jns_bel_akun_salkar_poc
Tgl Data : 05/26 2:13 PM

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 086
ESOLON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0500
SATUAN KERJA : 630612
JENIS SATUAN KERJA : KD

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA		% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4-7
5321	Belanja Modal Perawatan dan Pemeliharaan	202.100.000	1.990.667.000	1.989.946.983	0	1.989.946.983	720.017
532111	Belanja Modal Perawatan dan Pemeliharaan	202.100.000	1.990.667.000	1.989.946.983	0	1.989.946.983	720.017
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321						
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.160.000.000	78.266.000	78.071.029	0	78.071.029	226.971
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.344.678.000	1.336.300.110	0	1.336.300.110	8.369.890
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.160.000.000	1.422.076.000	1.414.379.139	0	1.414.379.139	8.598.861
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331						
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1.362.100.000	3.413.543.000	3.404.326.122	0	3.404.326.122	9.316.878
	JUMLAH BELANJA	18.933.131.000	21.178.088.000	20.695.214.731	6.185.549	20.689.029.182	489.058.818

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : { 000 } LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UNIT ORGANISASI : { 01 } LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : { 0600 } MANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : { 600612 } PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN
MANAJEMEN KINERJA

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 3:10 PM

Halaman : 1

lap_neraca_saikef_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenalkan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	9,410,020	0	9,410,020	0.00
Piutang Bukan Pajak	2,960,947	14,842,176	(11,881,229)	(80.05)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(14,005)	(74,210)	59,405	(80.05)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	2,946,942	14,767,966	(11,821,024)	(80.05)
Penediaian	227,585,300	223,173,232	4,412,068	1.98
JUMLAH ASET LANCAR	230,941,462	237,941,198	2,000,264	0.84
ASET TETAP				
Tanah	28,770,868,000	28,770,868,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	21,979,894,578	20,096,157,595	1,883,736,983	9.37
Gedung dan Bangunan	70,141,182,250	68,738,003,111	1,403,179,139	2.04
Jalan, Irigasi dan Jaringan	602,016,668	602,016,668	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	40,981,000	40,981,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(31,590,200,568)	(29,367,363,121)	(2,192,846,837)	7.46
JUMLAH ASET TETAP	89,944,734,538	88,850,665,253	1,094,069,285	1.23
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	0	20,000,000	(20,000,000)	(100.00)
Aset Lain-lain	126,210,000	0	126,210,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(126,210,000)	(20,000,000)	(106,210,000)	531.05
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	90,184,676,000	89,988,606,451	1,096,069,549	1.23
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	28,949,726	66,294,448	(37,344,722)	(56.32)
Pendapatan Diterima Dimuka	2,502,083	7,049,400	(4,547,317)	(64.51)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31,451,809	73,343,848	(41,892,039)	(57.12)
JUMLAH KEWAJIBAN	31,451,809	73,343,848	(41,892,039)	(57.12)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	90,153,224,191	89,915,262,603	1,137,961,588	1.28
JUMLAH EKUITAS	90,153,224,191	89,915,262,603	1,137,961,588	1.28
JUMLAH EKUITAS	90,153,224,191	89,915,262,603	1,137,961,588	1.28
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	90,184,676,000	89,988,606,451	1,096,069,549	1.23

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : { 086 } LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UNIT ORGANISASI : { 01 } LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : { 0600 } NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : { 680612 } PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBLIJAKAN
MANAJEMEN KINERJA

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:10 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_pos

Keterangan :

FINAL



1978120720041100001 1978120720041100001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : { 086 } LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
ESELON I : { 01 } LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : { 0600 } NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : { 680612 } PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 3:10 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pengisian Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6.835.067,317	5.533.591,600	1.301.475,717	23.52
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6.835.067,317	5.533.591,600	1.301.475,717	23.52
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	6.835.067,317	5.533.591,600	1.301.475,717	23.52
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	9.735.136.658	8.378.433.505	1.356.703.153	16.193
Beban Persediaan	209.204.332	111.274.388	97.929.944	88.008
Beban Barang dan Jasa	6.073.505.651	6.305.144.773	(231.639.222)	(3.674)
Beban Pemeliharaan	618.914.914	584.640.763	234.274.151	40.071
Beban Perjalanan Dinas	411.652.526	1.706.959.787	(1.295.307.261)	(75.884)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 ESELON I : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
 SATUAN KERJA : (600012) PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
 Tgl Cetak : 06/05/26 3:10 PM
 Halaman : 2
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Ulang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.299.056,837	2.343.728,584	(44,671,727)	(1,905)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(50,405)	74,210	(133,615)	(180,05)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	19.547,411,413	19.430,255,990	117,155,423	0,603
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(12,712,344,696)	(13,696,664,380)	1,184,320,294	(8,522)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(20,914,600)	7,739,186	(28,653,786)	(370,24 3)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	13,872,000	(13,872,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	20,914,600	6,132,814	14,781,786	241,028
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,306,000	47,192,000	(45,886,000)	(97,233)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,316,000	47,192,000	(45,876,000)	(97,211)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10,000	0	10,000	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(19,608,600)	54,931,186	(74,539,786)	(135,69 7)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(12,731,952,696)	(13,641,733,204)	1,109,780,508	(8,018)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(12,731,952,696)	(13,641,733,204)	1,109,780,508	(8,018)

Keterangan :

FINAL



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (086) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (680612) PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN
MANAJEMEN KINERJA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:10 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	89,015,262,603	90,801,921,624	(1,786,659,021)	(1.97)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(12,731,952,696)	(13,841,733,204)	1,109,780,508	(8.02)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	26,247,278	(9,453,264)	35,700,542	(377.65)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	20,914,600	(9,453,264)	30,367,864	(321.24)
LAIN-LAIN	5,332,678	0	5,332,678	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	13,843,667,006	12,064,527,447	1,779,139,559	14.75
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,137,961,588	(1,786,659,021)	2,924,620,609	(163.69)
EKUITAS AKHIR	90,153,224,191	89,015,262,603	1,137,961,588	1.28

Keterangan :

FINAL



**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 086
UAKPB : 689512

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN
KEMERJA

Tgl Data : 08/05/26 12:35 PM
Tanggal : 08/05/26 3:11 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	4,522,500
1010301003	Perangkat Kertas	4,060,500
1010301004	Penghapus/Korektor	30,000
1010301005	Buku Tulis	697,000
1010301006	Ordher Dan Map	30,562,100
1010301007	Penggaris	18,000
1010301008	Cutler (Alat Tulis Kantor)	747,000
1010301010	Alat Penskat	2,915,300
1010301011	Stadler HD	2,726,500
1010301014	Barang Cetakan	5,690,000
1010301099	Alat Tulis Kantor Lainnya	1,384,000
1010302001	Kertas HVS	21,364,000
1010302002	Berbagai Kertas	132,000
1010302004	Amplop	417,500
1010302599	Kertas Dan Cover Lainnya	1,800,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	37,127,000
1010304599	Bahan Komputer Lainnya	1,710,000
1010306001	Kabel Listrik	3,763,500
1010306002	Lampu Listrik	16,152,500
1010306010	Batu Baterai	672,000
1010306999	Alat Listrik Lainnya	4,919,500
1010311003	Persediaan Bahan Bahan Pemasangan Pertanian	2,788,000
1010312001	Bahan Bakar Minyak (Barang Konsumsi)	19,474,000
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	1,013,000
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	6,351,000
1010314005	Obat Gel Salep (Barang Konsumsi)	1,317,000
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	3,574,000
Jumlah Barang Konsumsi		175,288,200
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	3,690,000
1010305002	Alat-Alat Pad Dan Lap	12,166,500
1010305003	Ember, Bang, Dan Tempat Air Lainnya	868,000
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	1,226,600
1010305006	Bahan Kimia Untuk Pemeliharaan	6,004,000
1010305012	Pengharam Ruangan	2,370,500
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	25,971,500
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		52,297,100
TOTAL		227,585,300

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak,
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang,

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 036 **LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
UAKPB : 680612 **PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBUJAKAN MANAJEMEN KINERJA**

TglData : 06/05/26 12:35 PM
Tgl.Cetak : 06/05/26 3:12 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_fasc_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	175,288,200
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	52,297,100
131111	Tanah	28,770,868,000
132111	Peralatan dan Mesin	21,979,894,578
133111	Gedung dan Bangunan	70,141,182,250
134113	Jaringan	602,018,668
135121	Aset Tetap Lainnya	40,981,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19,312,931,654)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(11,798,142,167)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(479,136,137)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	106,210,000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	20,000,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(106,210,000)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(20,000,000)
J U M L A H		90,172,319,838

Acch Besar, 6 Mei 2026
Kepala UAKPB
Kendle Pustiana KHAN



**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 006
UAKPB : 600612

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 3:12 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_barm_intra_sel_kabier_poc

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		BERTAMBAH		KURANG		BERILUANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
131111	Tanah	1	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0
30101	YALAN PERKOTA	-	25,000	38.770.858.000	0	0	0	0	0	0	25,000	38.770.858.000
132111	Peralatan dan Mesin	-	29,000	26.770.858.000	0	0	0	0	0	0	29,000	26.770.858.000
30103	ALAT BANTU	-	3,764	30.096.157.995	252	1.983.946.953	3	105.210.000	4,033	21.979.094.578	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	4	1.268.409.035	2	35.000.000	0	0	0	0	6	1.633.489.035
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	10	1.290.431.000	0	0	0	0	0	0	10	1.290.431.000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	21	122.710.000	0	0	0	0	0	0	21	122.710.000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	1	232.808.219	1	2.500.000	0	0	0	0	2	235.208.219
30401	ALAT PENGHAPUS	-	0	0.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000
30402	ALAT PENGHAPUS	-	1	511.954	0	0	0	0	0	0	1	511.954
30501	ALAT KANTOR	-	526	3.428.522.053	8	18.800.000	0	0	0	0	534	3.447.322.053
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	2,653	8.172.518.042	139	778.335.085	0	0	0	0	2,792	9.230.853.127
30601	ALAT STUDIO	-	96	1.233.403.546	20	50.576.000	0	0	0	0	116	1.284.000.546
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	69	314.034.259	0	0	0	0	0	0	69	314.034.259
30701	PERALATAN PEMANCAR	-	1	8.250.000	0	0	0	0	0	0	1	8.250.000
30702	ALAT RESEPTERAN	-	12	21.844.340	1	30.000.000	0	0	0	0	13	51.844.340
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	1	6.398.000	0	0	0	0	0	0	1	6.398.000
30802	ALAT LABORATORIUM RUMAH TANGGA	-	8	13.875.960	0	0	0	0	0	0	8	13.875.960
31001	KOMPUTER UNIT	-	49	300.624.915	21	180.259.599	0	0	0	0	70	570.884.514
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	87	5.433.426.000	43	822.446.000	0	0	0	0	130	6.255.872.000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	212	1.079.587.273	8	22.500.000	0	0	0	0	220	1.095.087.273
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	9	367.148.860	0	0	0	0	0	0	9	367.148.860
132111	Gedung dan Bangunan	-	22	72.183.459	3	49.500.000	0	0	0	0	25	121.683.459
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	18	68.738.093.111	1	1.643.386.023	0	0	0	0	19	70.381.479.134
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	14	32.332.439.937	1	1.347.346.618	0	0	0	0	15	33.680.000.555
40201	TUGAS/ANALISA BAYAS	-	3	35.338.397.074	0	104.350.405	0	0	0	0	3	35.442.747.479
134113	Jaringan	-	1	1.071.157.000	0	0	0	0	0	0	1	1.071.157.000
30201	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	-	2	602.018.000	0	0	0	0	0	0	2	602.018.000
30202	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	-	1	150.258.059	0	0	0	0	0	0	1	150.258.059
135121	Aset Tetap Lainnya	-	1,026	48.981.000	0	0	0	0	0	0	1,026	48.981.000
168112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				118.248.028.374		3.638.463.006		345.358.884		121.641.154.698		

Aceh Besar, 6 Mei 2026

CHANDAN KUMAR LAKSHY

Mohammod Fuzail Khan



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 006 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
UAKPB : 600612 PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 3:12 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_barang_susut_intra_kel_satker_poc

KODE				JURUSAN		SAT		Jumlah dan Persentase				NILAI BUKU	
1		2		3		4	5	SALDO AWAL	MUTASI PENURUNAN	TOTAL	NILAI BUKU		
121111		Tata Rias				25.000	28.773.858.000	0	0	0	28.773.858.000		
121111		Tata Rias dan Meja				4.000	28.773.858.000	0	0	0	28.773.858.000		
30100		ALAT BAHUTU				4.000	21.070.894.578	118.315.248.883	172.686.881	118.315.248.883	2.646.862.854		
30201		ALAT ANGKUTAN DUAAT BERMOTOR				8	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0		
30202		ALAT ANGKUTAN DUAAT TAK BERMOTOR				18	1.260.431.300	1.260.431.300	0	0	0		
30301		ALAT BANGKEL BERMOTOR				8	122.710.000	122.710.000	0	0	0		
30302		ALAT BANGKEL TAK BERMOTOR				8	200.000.000	200.000.000	0	0	0		
30401		ALAT PENGOLAHAN				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
30501		ALAT KANTOR				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
30502		ALAT PERAKIT TANGGA				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
30601		ALAT STUKUR				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
30602		ALAT KOMUNIKASI				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
30603		PERALATAN PEMANCAR				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
30701		ALAT KEDOKTERAN				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
30702		ALAT KESEHATAN LAIN				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
30801		UNIT ALAT LABORATORIUM				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
30802		ALAT LABORATORIUM RISIKO KALKULASI ELEKTRONIKA				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
30901		KOMPUTER LAIN				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
30902		PERALATAN KOMPUTER				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
30903		UNIT PERALATAN PROSES PRODUKSI				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
30904		PERALATAN OLAH RAGA				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
30905		Peralatan dan Bangunan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
40101		BANGUNAN DEDUNG TEMPAT KERJA				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
40102		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT BENCANA				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
40201		LOKUTAN BATAS				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
40202		Jalan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
50501		BETALASI AIR BERSIH / AIR RAKA				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
50502		BETALASI LAIN				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
13101		Aksi Telp Lainnya				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
60101		Bahan Perawatan Tercetak				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19101		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19102		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19103		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19104		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19105		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19106		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19107		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19108		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19109		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19110		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19111		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19112		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19113		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19114		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19115		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19116		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19117		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19118		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19119		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19120		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19121		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19122		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19123		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19124		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19125		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19126		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19127		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19128		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19129		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19130		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19131		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19132		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19133		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19134		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19135		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19136		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19137		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19138		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19139		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19140		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19141		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19142		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19143		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19144		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19145		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19146		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19147		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19148		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19149		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19150		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19151		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19152		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19153		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19154		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19155		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19156		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19157		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19158		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19159		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19160		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19161		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19162		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19163		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19164		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19165		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19166		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19167		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19168		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19169		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19170		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19171		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19172		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19173		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19174		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19175		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19176		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19177		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19178		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19179		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19180		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19181		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19182		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19183		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19184		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19185		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19186		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19187		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19188		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19189		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19190		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19191		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19192		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19193		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19194		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19195		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
19196		Aksi Telp yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				8	1.000.000	1.000.000	0				

Aceh Besar, 6 Mei 2025

Kepada Yang Berhormat, JAKPR

Kepada Yang Berhormat, KHAN



005011001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 436 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 UAKPB : 630612 PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBELAKANGAN MANAJEMEN KINERJA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM
 Tgl Cetak : 06/05/26 3:12 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bnm_susut_extra_kel_sakber_poc

KODE		URAIAN		SAT		Kuantitas		Nilai		Saldo Awal		Mutasi Penyusutan		TOTAL		Nilai Akhir	
1		2		3		4		5		6		7		8		9-10	
13111		Perawatan dan Nersan				5.942		719.820.515		0		0		719.820.515		208.233.000	
31521		ALAT KULIAH				10		1.144.420		0		0		1.144.420		2.792.000	
31522		ALAT RUMAH TANGGA				1.774		634.704.433		0		0		634.704.433		217.122.000	
31601		ALAT STUDIO				13		8.000.808		0		0		8.000.808		3.442.000	
31602		ALAT KOMUNIKASI				11		3.999.891		0		0		3.999.891		1.594.000	
31603		PERALATAN PENANCAR				4		1.000.000		0		0		1.000.000		1.351.000	
31701		ALAT KEDOKTERAN				53		20.045.801		0		0		20.045.801		11.442.000	
31801		UNIT ALAT LABORATORIUM				4		2.960.000		0		0		2.960.000		487.000	
31802		PERALATAN KOMPUTER				83		44.300.000		0		0		44.300.000		32.592.000	
131121		Alat Tulis Lainnya				931		32.900.888		0		0		32.900.888		0	
05501		Sampah				101		32.900.000		0		0		32.900.000		32.592.000	
		JUMILAH				2.842		719.820.515		0		0		719.820.515		301.336.000	





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN APARATUR IV (PKP2A IV) LAN

DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO

No.	Satker	Sumber Subjek	KUPPA	Indeks	Program	Kegiatan	KD	Uraian RO	Paga	Realisasi	Full Week	Target	Satuan	Budicatat RO	Periode Progress	Status Kontinuitas	Status Yudisial	Jumlah RO	Cara Pelaporan	Indikator Capaian	Indikator Waktu	Target KPI RO	Target KPI RO	Nilai
1	60012	PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGIS KEPUKUAN MANAJEMEN ENERGI	001	12	CO	7914	403	Belaksanaan Kebijakan di Bidang Strategi Kebijakan Manajemen Energi	27.216.000	27.213.000	N	1	Melaksanakan	1	100	terkendali	00 - Data Vale	2	1	Maksimal	Standar	1	1	100
2	60012	PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGIS KEPUKUAN MANAJEMEN ENERGI	001	12	CO	7912	403	Belaksanaan Kebijakan di Bidang Strategi Kebijakan Manajemen Energi	21.800.000	21.213.000	N	20	Crng	20	100	terkendali	00 - Data Vale	2	1	Maksimal	Standar	20	20	100
3	60012	PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGIS KEPUKUAN MANAJEMEN ENERGI	001	12	CO	8120	804	Belaksanaan Kebijakan di Bidang Strategi Kebijakan Manajemen Energi	2.800.000	2.000.000	N	2	Crng	2	100	terkendali	00 - Data Vale	2	1	Maksimal	Standar	2	2	100
4	60012	PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGIS KEPUKUAN MANAJEMEN ENERGI	001	12	CO	7914	804	Belaksanaan Kebijakan di Bidang Strategi Kebijakan Manajemen Energi	18.800.000	18.000.000	N	3	Crng	3	100	terkendali	00 - Data Vale	2	1	Maksimal	Standar	3	3	100
5	60012	PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGIS KEPUKUAN MANAJEMEN ENERGI	001	12	CO	7914	803	Belaksanaan Kebijakan di Bidang Strategi Kebijakan Manajemen Energi	1.201.000.000	1.191.700.119	P	94	Crng	94	100	terkendali	00 - Data Vale	2	1	Maksimal	Standar	94	94	100
6	60012	PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGIS KEPUKUAN MANAJEMEN ENERGI	001	12	CO	7916	803	Belaksanaan Kebijakan di Bidang Strategi Kebijakan Manajemen Energi	1.348.180.000	1.332.240.271	N	348	Crng	348	100	terkendali	00 - Data Vale	2	1	Maksimal	Standar	348	348	100
7	60012	PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGIS KEPUKUAN MANAJEMEN ENERGI	001	12	CO	7916	804	Belaksanaan Kebijakan di Bidang Strategi Kebijakan Manajemen Energi	75.000.000	68.345.743	P	75	Crng	75	100	terkendali	00 - Data Vale	2	1	Maksimal	Standar	75	75	100
8	60012	PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGIS KEPUKUAN MANAJEMEN ENERGI	001	12	CO	7916	803	Belaksanaan Kebijakan di Bidang Strategi Kebijakan Manajemen Energi	1.300.788.000	1.192.080.012	N	3	Crng	3	100	terkendali	00 - Data Vale	2	1	Maksimal	Standar	3	3	100

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV (PKP2A IV) LAN

8	600010	PUSAT PEMBELAJARAN DAIRY STRATEGIC RESEARCH MANAJEMEN KEPERAWATAN	001	12	6A	7918	COL	001	Layanan Consulting Tutorship Internasional dan Komunitas	77.425.000	11.400.000	R	1	U4B	1	100	Indikator Kinerja	20 - Data Valid	2	1	Maximize Standard	1	1	500
9	600010	PUSAT PEMBELAJARAN DAIRY STRATEGIC RESEARCH MANAJEMEN KEPERAWATAN	001	12	6A	7918	COL	001	Layanan Holding Manajemen dan Informasi	30.100.000	10.100.000	R	1	Layanan	1	100	Indikator Kinerja	20 - Data Valid	2	1	Maximize Standard	1	1	500
10	600010	PUSAT PEMBELAJARAN DAIRY STRATEGIC RESEARCH MANAJEMEN KEPERAWATAN	001	12	6A	7918	COL	001	Layanan Holding Manajemen dan Informasi	20.100.000	10.100.000	R	1	Layanan	1	100	Indikator Kinerja	20 - Data Valid	2	1	Maximize Standard	1	1	500
11	600010	PUSAT PEMBELAJARAN DAIRY STRATEGIC RESEARCH MANAJEMEN KEPERAWATAN	001	12	6A	7918	COL	001	Layanan Holding Manajemen dan Informasi	30.100.000	10.100.000	R	1	Layanan	1	100	Indikator Kinerja	20 - Data Valid	2	1	Maximize Standard	1	1	500
12	600010	PUSAT PEMBELAJARAN DAIRY STRATEGIC RESEARCH MANAJEMEN KEPERAWATAN	001	12	6A	7918	COL	001	Layanan Holding Manajemen dan Informasi	30.100.000	10.100.000	R	1	Layanan	1	100	Indikator Kinerja	20 - Data Valid	2	1	Maximize Standard	1	1	500
13	600010	PUSAT PEMBELAJARAN DAIRY STRATEGIC RESEARCH MANAJEMEN KEPERAWATAN	001	12	6A	7918	COL	001	Layanan Holding Manajemen dan Informasi	30.100.000	10.100.000	R	1	Layanan	1	100	Indikator Kinerja	20 - Data Valid	2	1	Maximize Standard	1	1	500
14	600010	PUSAT PEMBELAJARAN DAIRY STRATEGIC RESEARCH MANAJEMEN KEPERAWATAN	001	12	6A	7918	COL	001	Layanan Holding Manajemen dan Informasi	30.100.000	10.100.000	R	1	Layanan	1	100	Indikator Kinerja	20 - Data Valid	2	1	Maximize Standard	1	1	500
15	600010	PUSAT PEMBELAJARAN DAIRY STRATEGIC RESEARCH MANAJEMEN KEPERAWATAN	001	12	6A	7918	COL	001	Layanan Holding Manajemen dan Informasi	30.100.000	10.100.000	R	1	Layanan	1	100	Indikator Kinerja	20 - Data Valid	2	1	Maximize Standard	1	1	500
16	600010	PUSAT PEMBELAJARAN DAIRY STRATEGIC RESEARCH MANAJEMEN KEPERAWATAN	001	12	6A	7918	COL	001	Layanan Holding Manajemen dan Informasi	30.100.000	10.100.000	R	1	Layanan	1	100	Indikator Kinerja	20 - Data Valid	2	1	Maximize Standard	1	1	500
17	600010	PUSAT PEMBELAJARAN DAIRY STRATEGIC RESEARCH MANAJEMEN KEPERAWATAN	001	12	6A	7918	COL	001	Layanan Holding Manajemen dan Informasi	30.100.000	10.100.000	R	1	Layanan	1	100	Indikator Kinerja	20 - Data Valid	2	1	Maximize Standard	1	1	500



PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV (PKP2A IV) LAN

[illegible]



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	820260120981657
Tanggal Billing	20-01-2026 16:31:43
Tanggal Kedaluwarsa	27-01-2026 16:31:43
Tanggal Bayar	20-01-2026 16:36:11
Bank/Pos/Fintech Bayar	BANK SYARIAH INDONESIA
Channel Bayar	Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga	086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	680612 - Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja
Total Disetor	746.947 (IDR)
Terbilang	<i>Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh (IDR)</i>
Status	Sudah Dibayar
NTB	FT26020W8LSH
NTPN	A04020NA0M0I4S4P

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	746.947 (IDR)
Keterangan	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Desember TA 2025 A.n Faizal Adriansyah; dkk (16 Orang)



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	820260120981717
Tanggal Billing	20-01-2026 16:33:15
Tanggal Kedaluwarsa	27-01-2026 16:33:15
Tanggal Bayar	20-01-2026 16:35:29
Bank/Pos/Fintech Bayar	BANK SYARIAH INDONESIA
Channel Bayar	Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga	056 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	680612 - Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja
Total Disetor	364.000 (IDR)
Terbilang	<i>Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu (IDR)</i>
Status	Sudah Dibayar
NTB	FT26020NDXVP
NTPN	48C203CIG6FNBS6L

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	364.000 (IDR)
Keterangan	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan Bulan Desember TA 2025 A.n Nur Aqmal, dkk (4 Orang)



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	820260420772866
Tanggal Billing	20-04-2026 11:31:58
Tanggal Kedaluwarsa	27-04-2026 11:31:58
Tanggal Bayar	21-04-2026 11:30:06
Bank/Pos/Fintech Bayar	BANK SYARIAH INDONESIA
Channel Bayar	Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	IRZA AULIA
Kementerian/Lembaga	086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	680612 - Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja
Total Disetor	1.110.000 (IDR)
Terbilang	Satu juta Seratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	Sudah Dibayar
NTB	FT26111NSZ2S
NTPN	C56B249001B1LP02

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	1.110.000 (IDR)
Keterangan	Pengembalian Tunjangan Umum Bulan Juni, Juli, Agustus TA 2025 An Heru Syah Putra dan Zulaikha



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	820260408022940
Tanggal Billing	08-04-2026 11:46:28
Tanggal Kedaluwarsa	15-04-2026 11:46:28
Tanggal Bayar	08-04-2026 11:50:01
Bank/Pos/Fintech Bayar	BANK SYARIAH INDONESIA
Channel Bayar	Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	IRZA AULIA
Kementerian/Lembaga	086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	680612 - Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja
Total Disetor	370.000 (IDR)
Terbilang	Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu (IDR)
Status	Sudah Dibayar
NTB	FT26098TZZTW
NTPN	336863CIG6093L55

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	370.000 (IDR)
Keterangan	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Umum PNS Tugas Belajar A.n Imam Baihaqi Lukman

Plan



Canva Teams

[Manage members \(6\)](#)[Cancel plan](#)

Plan renews on
December 12, 2026
[Change date](#)



Price
Rp4,380,000/year
[Auto-renewal](#)



Team members
6
[Invite people](#)



Receipt

11 December 2025

Order ID

AT271621546

Subscription

773666234267

Right Account

[mailto=info@canva.com](#)



Canva
Canva Editor
Canva Pro (Monthly)
Canva Pro (Yearly)
Canva Pro (2025)

Rp 4380000

PUSJAR SKMK - LAN

